



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang
E-mail: kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
Laman: sumsel.kemenkumham.go.id

Nomor : W.6-PR.03-0364

4 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Cq. Kepala Biro Perencanaan
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ilham Djaya
NIP 196412201991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Para Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Para Kepala Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM SUMATERA SELATAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan misi organisasi. Guna mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, Instansi Pemerintah merangkum capaian kinerja yang telah ditargetkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal tersebut sebagai perwujudan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, target kinerja serta capaian kinerja selama Tahun 2023 dalam melakukan misi dan tujuan organisasi baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023. Sebagai suatu harapan bersama bahwa dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance*, serta tetap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun bentuk penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Kepala Kantor Wilayah,

Ilham Djaya
NIP 196412201991031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Birokrasi pemerintahan juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Melalui birokrasi, diharapkan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

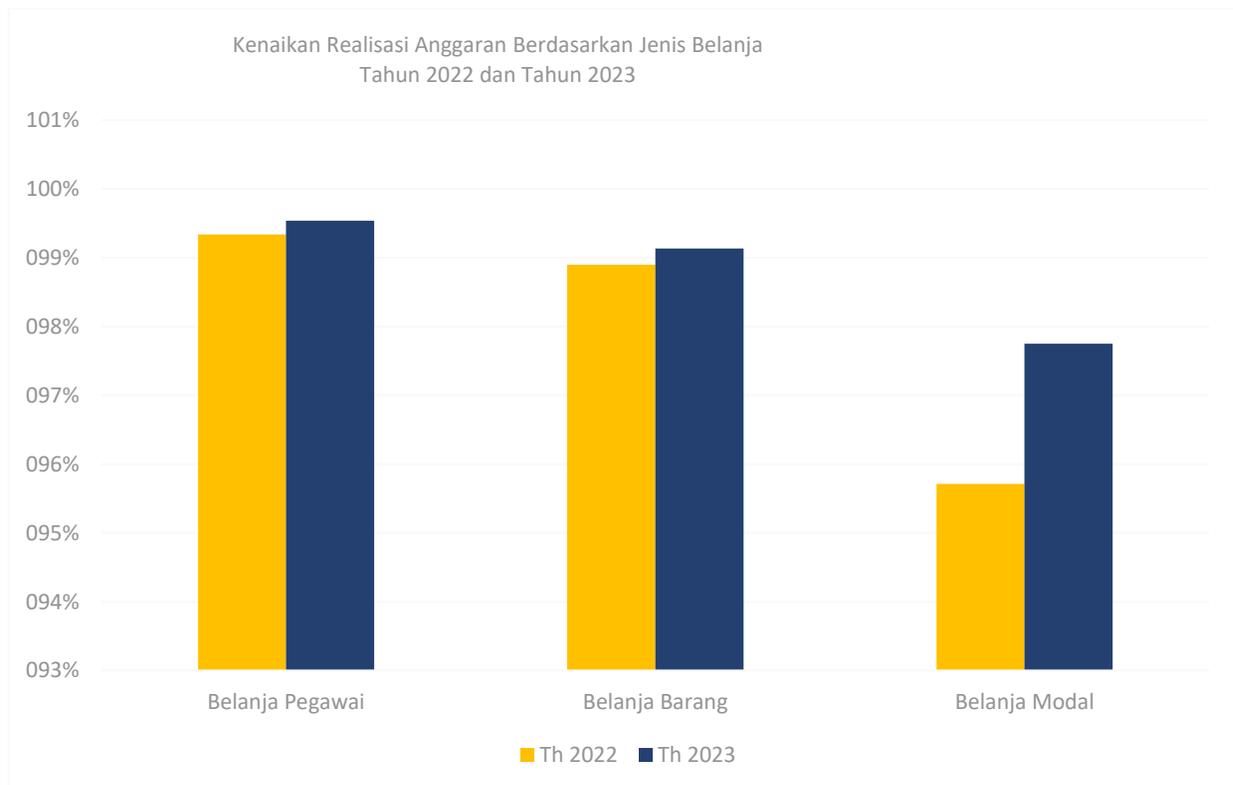
Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

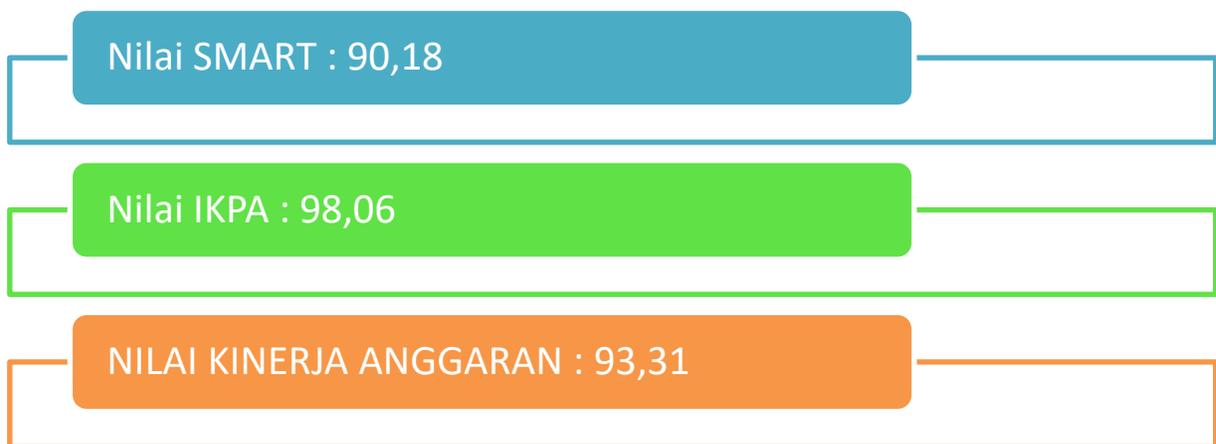
No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi		
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	125,80%
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan		
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	120,17%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	103,37%
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	173,75%
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	120,06%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	157,34%
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	110,73%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	115,40%
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	112,33%
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	129,72%
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian		
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	120,83%
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum		
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	-3,62%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	116,00%
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	363,64%

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	100%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	125,00%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	91,30%
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	100,00%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	194,17%
Direktorat Jenderal HAM		
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1263,67%
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	300,00%
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM		
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	112,50%

Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022, pada jenis belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja belanja modal mengalami kenaikan sebesar 2,04%.



Capaian Kinerja Anggaran diperoleh dari dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. Berikut ini merupakan rata-rata nilai SMART, nilai IKPA, dan nilai kinerja anggaran dari seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan periode Tahun 2023.



Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	13
D. ASPEK STRATEGIS	13
E. ISU STRATEGIS.....	14
F. SISTEMATIKA LAPORAN	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
B. REALISASI ANGGARAN	160
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	163
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	171

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	178
B. SARAN	179

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	3
2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 ..	20
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
4. Capaian Kinerja Tahun 2023	31
5. Capaian Kinerja Divisi Administrasi.....	33
6. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Tahun 2023.....	33
7. Komponen Penilaian pada Survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	33
8. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	34
9. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	34
10. Kedisiplinan Pegawai Berdasarkan Kehadiran.....	35
11. Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan/Direktorat Jenderal Pemasarakatan.....	37
12. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah Tahun 2023	40
13. Rekapitulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah Tahun 2023.....	41
14. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	41
15. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	42
16. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun 2023	43
17. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	43
18. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	44
19. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023.....	44
20. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	45
21. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	45
22. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Tahun 2023	46
23. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas	

Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	47
24. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	47
25. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023	49
26. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	49
27. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	49
28. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023.....	50
29. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	51
30. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	51
31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023	52
32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	52
33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	53
34. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023	53
35. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	54
36. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	54
37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023	55
38. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	55
39. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	56
40. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023.....	57
41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	57

42. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidanayang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	58
43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif Tahun 2023	58
44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	59
45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	59
46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023.....	60
47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	61
48. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	61
49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023	62
50. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	62
51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	63
52. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023.....	64
53. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	65
54. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	65
55. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023	66
56. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	67
57. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	67
58. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023.....	68
59. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	68
60. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak	

Pendidikannya Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	69
61. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023	70
62. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	71
63. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	71
64. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023	72
65. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	73
66. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	73
67. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023.....	74
68. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	74
69. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	75
70. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023	75
71. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	76
72. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	76
73. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2023	78
74. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	78
75. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	78
76. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun 2023	79
77. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	80
78. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	80
79. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023	81

80. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	81
81. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	82
82. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023	83
83. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	83
84. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	84
85. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023.....	85
86. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	85
87. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	86
88. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Tahun 2023	87
89. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	87
90. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	87
91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023	88
92. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	89
93. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	89
94. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023	90
95. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	90
96. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	91
97. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi	

Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023	92
98. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	93
99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	93
100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023	94
101. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	95
102. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	95
103. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023	96
104. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	97
105. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	97
106. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023	98
107. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ..	99
108. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah....	99
109. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023	100
110. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	101
111. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah .	101
112. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023	102

113. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	103
114. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	103
115. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023	104
116. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	105
117. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	106
118. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023	107
119. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	107
120. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	108
121. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Keimigrasian.....	109
122. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023	109
123. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	110
124. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	110
125. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	111
126. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023	112
127. Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023	112
128. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	113
129. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	113
130. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	115
131. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023	116

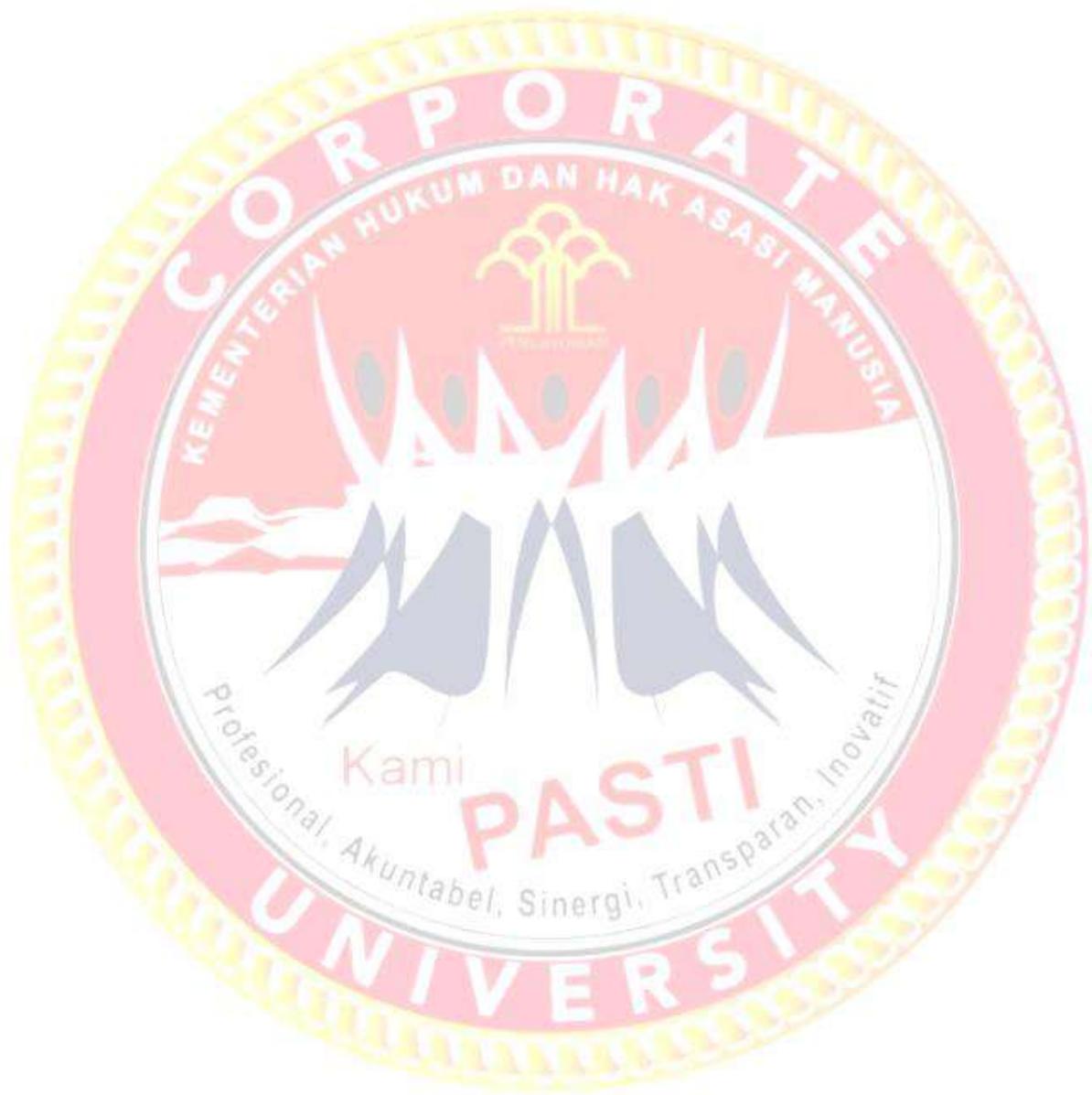
132. Perhitungan Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah.....	116
133. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	116
134. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	116
135. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023	118
136. Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah	118
137. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	119
138. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	119
139. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	120
140. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023	121
141. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	121
142. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	122
143. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023	123
144. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	123
145. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	123
146. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023.....	125
147. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	125
148. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	126
149. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023.....	126
150. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan	

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	127
151. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	127
152. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023	128
153. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	128
154. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	129
155. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	129
156. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023	130
157. Rekapitulasi Fasilitasi Harmonisasi Raperda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023	131
158. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	131
159. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	131
160. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023	133
161. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	133
162. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	133
163. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	134
164. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023	136
165. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	136
166. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	136
167. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023	138
168. Perhitungan Bantuan Hukum Litigasi	138
169. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	

yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	138
170. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	138
171. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023	139
172. Perhitungan Bantuan Hukum Non Litigasi.....	140
173. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	140
174. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	140
175. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023	141
176. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023	141
177. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	143
178. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	144
179. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023	145
180. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	145
181. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	145
182. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023	146
183. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	146
184. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	147
185. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	147
186. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023.....	148
187. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	149

188. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	149
189. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023.....	150
190. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	150
191. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	150
192. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023.....	151
193. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	152
194. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti	152
195. Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	152
196. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023	153
197. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	154
198. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	155
199. Capaian Kinerja Badan Strategi Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	156
200. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023.....	156
201. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	157
202. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	157
203. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023	158
204. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	159
205. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	159
206. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan.....	160
207. Realisasi Anggaran 2023 Berdasarkan Satuan Kerja	162

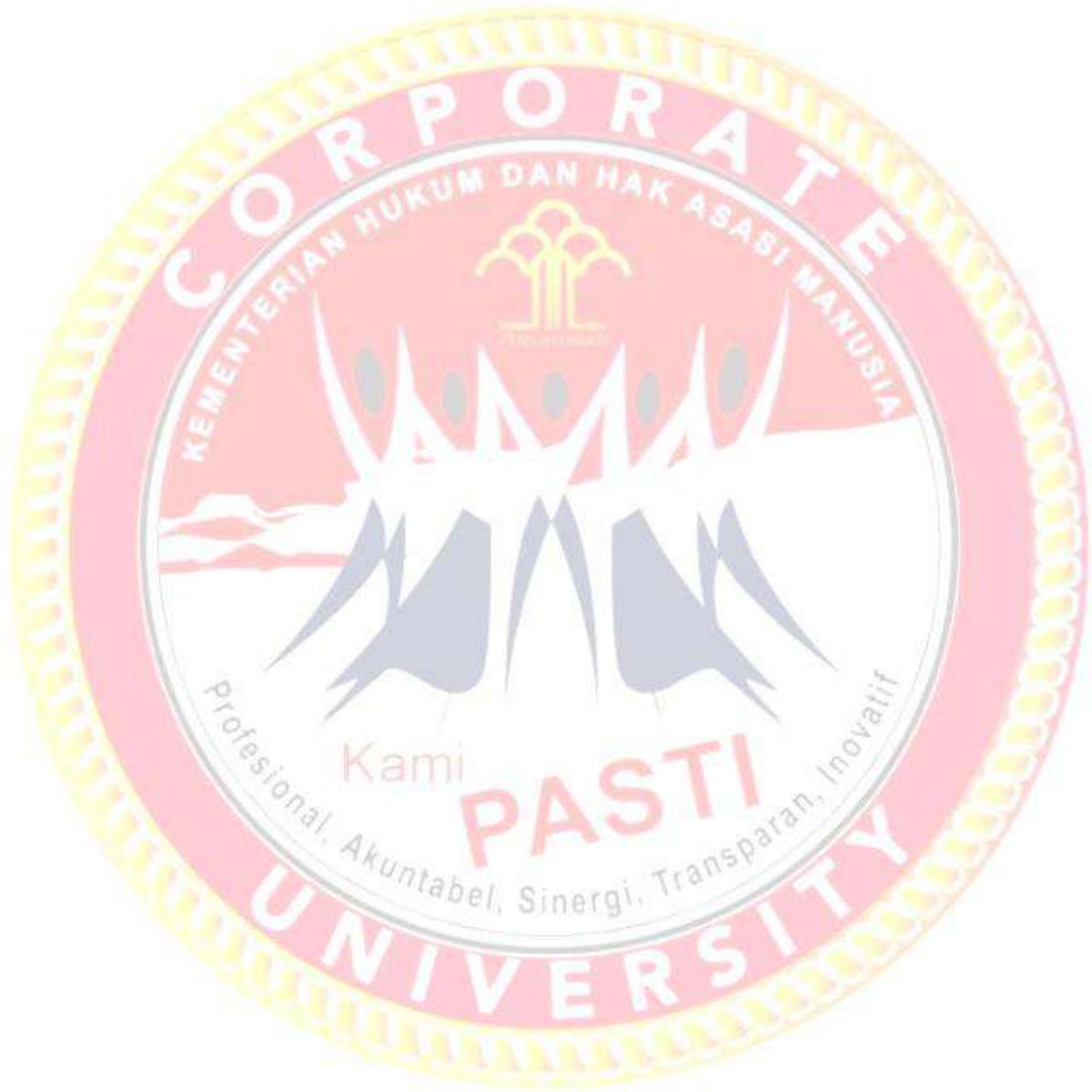
208. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2023	164
209. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2023	166
210. Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	170
211. Capaian Kinerja Tahun 2023	178



Daftar Gambar

1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pendidikan.....	3
2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	4
3. Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham Sumsel	12
4. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	32
5. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	40
6. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	43
7. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	48
8. Sasaran Kegiatan 4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	60
9. Sasaran Kegiatan 5 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	64
10. Sasaran Kegiatan 6 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	70
11. Sasaran Kegiatan 7 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	77
12. Sasaran Kegiatan 8 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	85
13. Sasaran Kegiatan 9 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	92
14. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	109
15. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	115
16. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	118
17. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	121
18. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	125
19. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	130
20. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	132
21. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	135
22. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	137
23. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	148
24. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	153
25. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	156
26. Perbandingan Realisasi Anggaran.....	163

27. SMART 164
28. E-Performance Kementerian Hukum dan HAM 171
29. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM 174
30. E-Monev Bappenas 174



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum dan HAM, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan dibidang Hukum dan HAM; penegakan hukum di bidang masyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi HAM; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berada di 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota yaitu : (1) Ogan Komering Ilir; (2) Ogan Komering Ulu; (3) Muara Enim; (4) Lahat; (5) Musi Rawas; (6) Musi Banyuasin; (7) Banyuasin; (8) OKU Selatan; (9) OKU Timur; (10) Ogan Ilir; (11) Empat Lawang; (12) Palembang; (13) Prabumulih; (14) Pagaralam; (15) Lubuk Linggau; (16) Penukal Abab Lematang Ilir; (17) Musi Rawas Utara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan terdiri dari 29 Satuan Kerja yang meliputi:

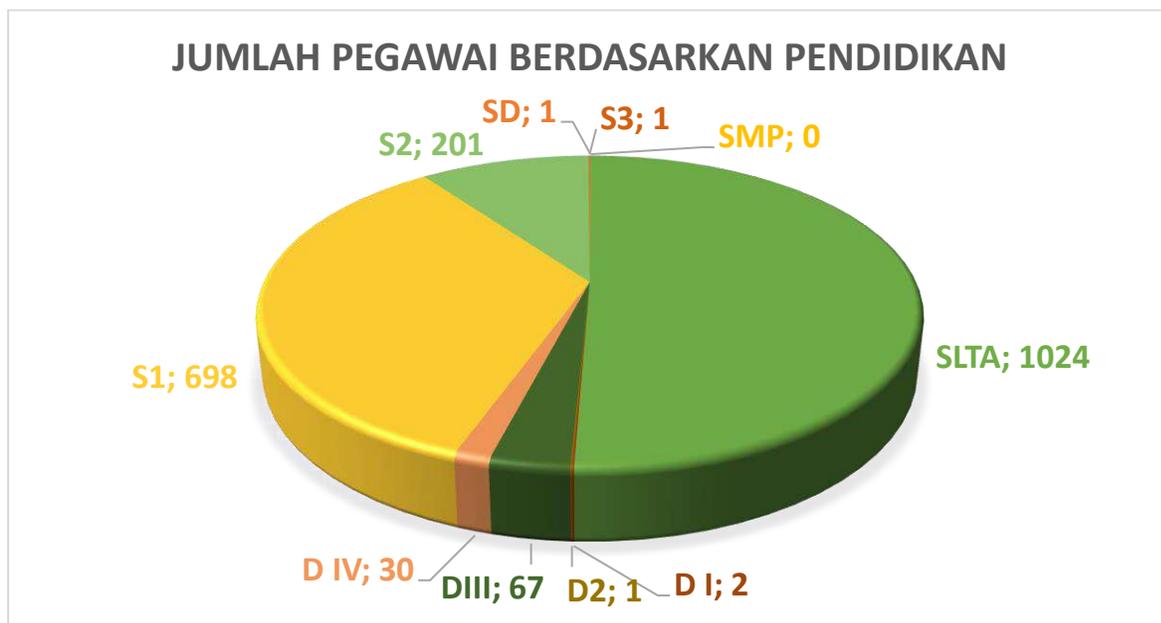
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebanyak 26 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang;
 - b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
 - c. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat;
 - d. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau;
 - e. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim;
 - f. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sekayu;
 - g. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja;
 - h. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja;
 - i. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih;
 - j. Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang;
 - k. Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang;
 - l. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang;
 - m. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja;
 - n. Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat;
 - o. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang;
 - p. Balai Pemasarakatan Kelas II Musi Rawas Utara;
 - q. Balai Pemasarakatan Kelas II Ogan Komering Ulu Induk;
 - r. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin;
 - s. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kayu Agung;
 - t. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
 - u. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Empat Lawang;
 - v. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Surulangun Rawas;
 - w. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam;
 - x. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura;
 - y. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Dua;
 - z. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
3. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi sebanyak 2 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;
 - b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut.

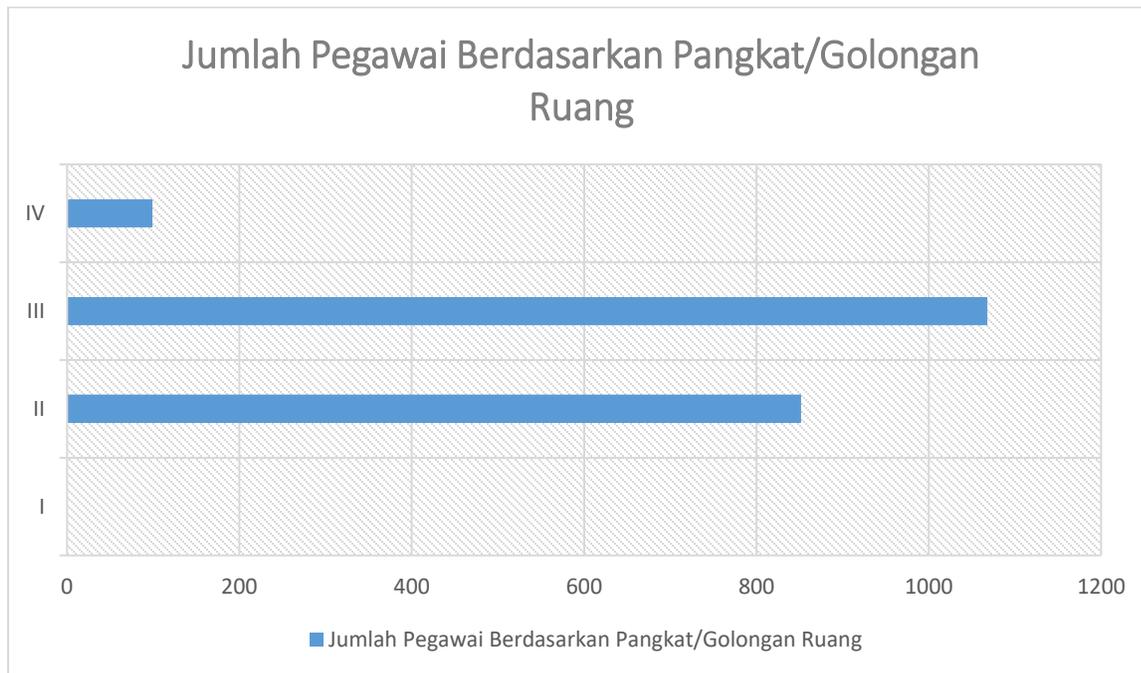
Tabel 1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	112	77	189
2	LAPAS KELAS I PALEMBANG	102	14	116
3	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	67	23	90
4	LAPAS KELAS IIA LAHAT	60	9	69
5	LAPAS KELAS IIA LUBUK LINGGAU	53	14	67
6	LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM	75	9	84
7	LAPAS KELAS IIB SEKAYU	63	4	67
8	LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA	73	10	83
9	RUTAN KELAS IIB BATURAJA	36	7	43
10	RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH	55	14	69
11	RUTAN KELAS I PALEMBANG	113	16	129
12	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	55	40	95
13	RUPBASAN KELAS I PALEMBANG	19	14	33
14	RUPBASAN KELAS II BATURAJA	10	5	15
15	KANIM KELAS I TPI PALEMBANG	47	35	82
16	KANIM KELAS II NON TPI MUARA ENIM	25	7	32
17	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT	24	8	32
18	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG	16	77	93
19	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUSI RAWAS UTARA	17	7	24
20	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II OGAN KOMERING ULU INDUK	16	8	24
21	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	74	10	84
22	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	73	11	84
23	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	75	11	86
24	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	33	4	37
25	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	28	3	31
26	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	43	6	49
27	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	60	8	68
28	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	43	4	47
29	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	86	11	97
TOTAL		1553	466	2019

Gambar 1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang



Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memiliki 9 (sembilan) Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui 4 program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pembentukan Regulasi;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
4. Program Pemajuan dan Penegakan HAM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Konsultasi dan bantuan hukum;
8. Pengordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Masyarakat, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Adapun fungsi dari Divisi Administrasi adalah:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari 2 bagian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

a) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, peaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

b) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas antara lain penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu:

a) Subbagian Program dan Pelaporan:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi:

Melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Adapun fungsi dari Divisi Pemasarakatan adalah:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan;

- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu:

a) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.

b) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

2) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

b) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Adapun fungsi Divisi Keimigrasian adalah:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;

- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a) Subbidang Perizinan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan keimigrasian.

b) Subbidang Informasi Keimigrasian:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a) Subbidang Intelijen Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

b) Subbidang Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Adapun fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari 3 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

b) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran,

sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

b) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang HAM mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

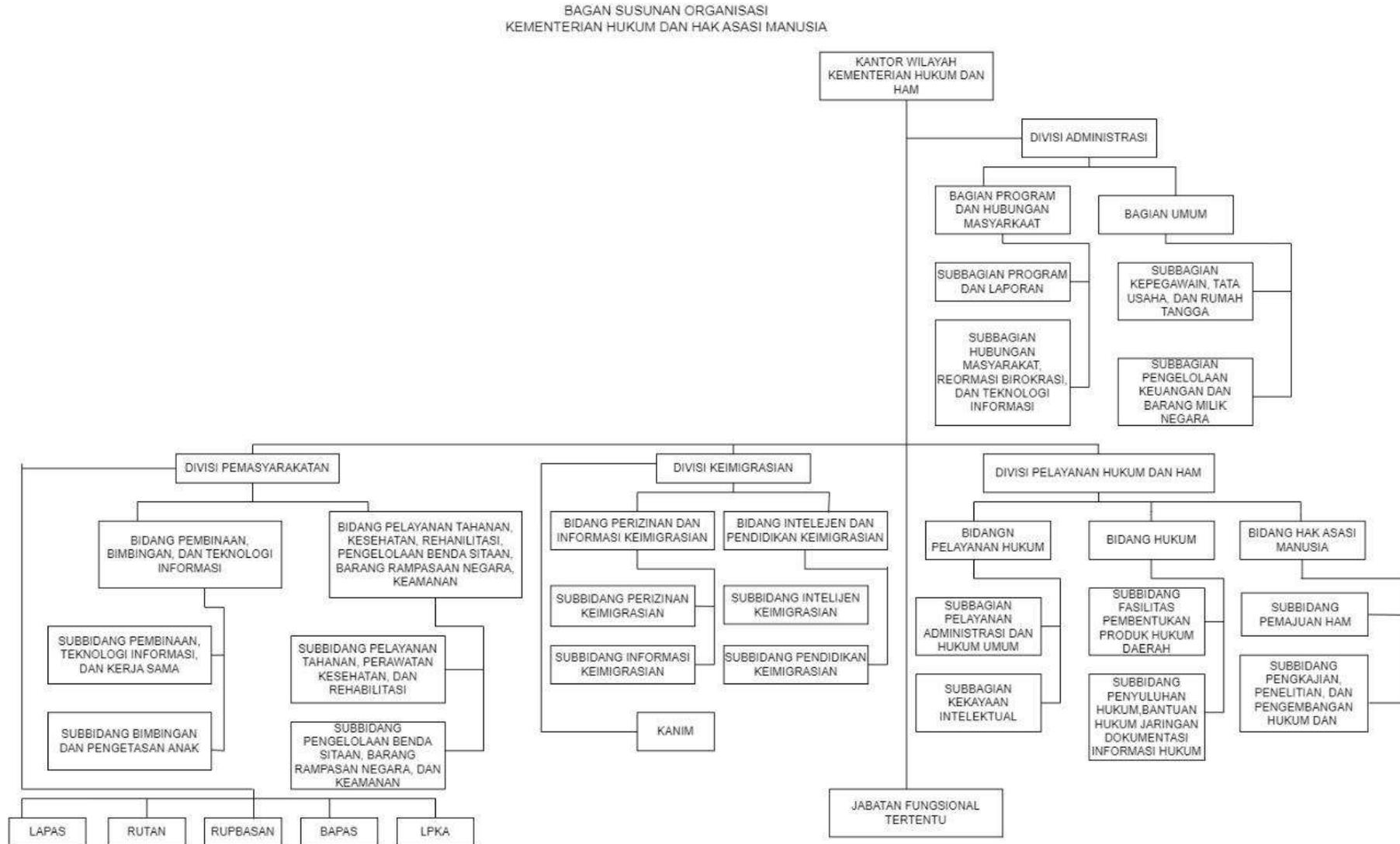
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.

b) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian Hukum dan HAM.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan 2 (dua) prioritas nasional, yang terdiri dari:

- Prioritas Nasional 4: Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
- Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
2. Pembinaan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual;

4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia;
5. Pelayanan hukum;
6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi Hak Asasi Manusia;
7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, mengingat kondisi umum potensi dan permasalahan dan pemetaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang dan juga kelemahan dan tantangan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan atau peluang yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki jenis pelayanan publik yang cukup bervariasi, mempunyai peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja.

Sedangkan, yang menjadi permasalahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di antaranya adalah sebagai berikut.

- Divisi Administrasi:
 - Terbatasnya ketersediaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada e-katalog sehingga upaya dalam rangka mendukung terlaksananya Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tidak maksimal
- Divisi Pemasyarakatan
 - Masih terdapat *overstaying* (kelebihan masa huni tahanan) pada Lapas/Rutan yang berada di Sumatera Selatan
 - Masih terdapat *over capacity* (kelebihan kapasitas Warga Binaan) pada Lapas/Rutan yang berada di Sumatera Selatan
 - Masih terdapat Warga Binaan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada PEMILU 2024 antara lain disebabkan alamat pada KTP tidak sesuai dengan domisili, NIK ganda, data tidak lengkap, penghuni Lapas/Rutan yang fluktuatif, sering terjadi pemindahan antar Rutan/Lapas, dan lain sebagainya
- Divisi Keimigrasian
 - Sering terjadinya error pada Aplikasi Layanan Paspor Online (APAPO) dan M- Paspor;
 - Keterbatasan kuota permohonan Paspor secara online melalui Aplikasi M-Paspor yang dibuka dalam kurun waktu per 2 minggu;
 - Pendirian Unit Kerja Kantor Imigrasi Musi Banyuasin di Kabupaten Sekayu dan Kota Lubuk Linggau telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, tetapi belum bisa beroperasi secara maksimal dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan pelayanan Keimigrasian;

- Belum sepenuhnya pelaporan keberadaan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) oleh pihak Hotel dan penginapan yang berada di wilayah Sumatera Selatan;
- Tidak pastinya jadwal persetujuan Maksimum Pencairan (MP) atas anggaran PNP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai kalender kerja.
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - Banyak Pemerintah Daerah yang masih kurang peka tentang tugas dan fungsi dari Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah;
 - Masih ada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memahami perlunya keikutsertaan perancang dalam pembentukan produk hukum daerah.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran, termasuk di

dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi untuk mencapai sasaran strategis yang telah disusun.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

Visi :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi :

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional,

Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa memegang teguh *Core Values* ASN BerAKHLAK. *Core values* **BerAKHLAK** yang dimaksud merupakan singkatan dari **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**. Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar dengan makna:

1. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya ialah:

- a. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- f. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- g. Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur;
- h. Meningkatkan SDM kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang unggul dan berdaya saing;
- i. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan;
- j. Meningkatkan efektivitas organisasi;

- k. Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi					
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Program Dukungan Manajemen	19.668.379.000
TOTAL					19.668.379.000
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan					
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 indeks	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	59.743.560.600
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	8.270.270.600
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%		
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%		
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	45.820.807.000
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%		
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%		
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%		
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%		
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%		
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	900.312.000
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%		
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	2.689.586.600
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%		
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%		
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	1.901.328.600
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%		
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%		
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%		
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	- Program Pelayanan dan	59.743.560.600

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%		
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	59.743.560.600
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%		
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/ anak sesuai dengan standar	80%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	59.582.304.800
		Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
		Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
		Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%		
TOTAL					298.395.291.400
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian					
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20 Indeks	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	5.028.378.000
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12 Indeks		
TOTAL					5.028.378.000
Direktorat Jenderal AHU – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	166.793.000
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	865.007.000
TOTAL					2.527.800.000
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	33 permohonan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.382.545.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus		
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	56.842.000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus		
		Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan		
TOTAL					1.439.387.000
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	Program Pembentukan Regulasi	264.009.000
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	23 orang	Program Pembentukan Regulasi	90.991.000
TOTAL					355.000.000
BPHN – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	- Program Pembentukan Regulasi - Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	135.197.000
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	- Program Pembentukan Regulasi - Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.630.736.000
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%		
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%		
TOTAL					1.765.933.000
Direktorat Jenderal HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 instansi pemerintah	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	204.980.000
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 instansi pemerintah		
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah		
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	11.230.000
TOTAL					216.210.000
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	Program Dukungan Manajemen	214.073.000
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku		
TOTAL					214.073.000
TOTAL KESELURUHAN					329.610.451.400

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disusun guna membantu mewujudkan sasaran-sasaran secara tepat, terukur, dan dan akuntabel. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang dapat menjadi alat bantu ukur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan 9 urusan sebagai turunan dari Unit Eselon I yakni sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Direktorat Jenderal Keimigrasian;
9. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

B. Perjanjian Kinerja

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang memiliki 4 (empat) divisi, pada tahun 2023 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada para Kepala Divisi dalam hal ini Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat divisi tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon I masing-masing. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang perlu dicapai yang berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi			
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 indeks
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
		Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian			
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20 Indeks
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12 Indeks
Direktorat Jenderal AHU – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	33 permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus
		Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	23 orang
BPHN – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%
Direktorat Jenderal HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 instansi pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 instansi pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023 telah tercapai sebagaimana berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi		
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	125,80%
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan		
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	120,17%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	103,37%
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	173,75%
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	120,06%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	157,34%
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	110,73%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	115,40%
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	112,33%
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	129,72%
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian		
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	120,83%
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum		
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	-3,62%

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	116,00%
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	363,64%
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	100%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	125,00%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	91,30%
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	100,00%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	194,17%
Direktorat Jenderal HAM		
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1263,67%
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	300,00%
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM		
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	112,50%

Analisa Capaian Kinerja

- **Capaian Kinerja Divisi Administrasi/Sekretariat Jenderal**

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah dengan target 3,1 indeks.

Gambar 4. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 5. Capaian Kinerja Divisi Administrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,9 Indeks	125,8

Nilai indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah diperoleh dari survey Balitbangkumham yang dilaksanakan setiap bulan. Adapun nilai 3,9 merupakan hasil dari rata-rata nilai indeks Bulan Januari sampai dengan Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Tahun 2023

No.	Bulan	Nilai Indeks	Nilai Konversi
1	Januari 2023	97,32	3,89
2	Februari 2023	97,32	3,89
3	Maret 2023	98,36	3,93
4	April 2023	98,38	3,93
5	Mei 2023	99,08	3,99
6	Juni 2023	95,41	3,81
7	Juli 2023	97,22	3,81
8	Agustus 2023	97,97	3,91
9	September 2023	98,23	3,92
10	Oktober 2023	97,61	3,90
11	November 2023	98,32	3,93
12	Desember 2023	97,61	3,90
RATA-RATA		97,73	3,90

Adapun nilai yang dihasilkan secara otomatis pada aplikasi survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM adalah dalam skala 100, sehingga untuk memperoleh nilai dalam skala 4 sebagaimana target pada Perjanjian Kinerja maka perlu dilakukan konversi nilai dengan membaginya dengan angka 25, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai Konversi} = \frac{\text{Nilai indeks}}{25}$$

Dengan demikian, diperoleh nilai indeks kepuasan layanan internal Tahun 2023 adalah 3,90 indeks. Berikut ini merupakan komponen penilaian pada survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tabel 7. Komponen Penilaian pada Survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Indikator	Variabel
Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi (Index Sistem Anti Korupsi)	Transparansi
	Menerima Imbalan
	Perlakuan yang Sama
	Prosedur
	Privasi Pelapor
	Proses Pelanggaran
	Pencegahan Korupsi

Indikator	Variabel
Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM (Index SDM)	Penerimaan Pegawai
	Penempatan
	Promosi Jabatan
	Pengembangan Kompetensi
	Kenaikan Pangkat
	Gaji
	Presensi Pegawai
Integritas dan Pelaksanaan Anggaran (Index Anggaran)	Perjalanan Dinas
	PBJ
	Honorarium
	Bukti Transaksi
Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma (Index Aturan dan Norma)	Tanggung Jawab
	Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
	Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
	Kode Etik

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	-	-	-	3,1	3,93	126,77	3,1	3,92	126,45	3,1	3,9	125,8

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020, tidak terdapat indikator indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah. Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021 sampai dengan 2023, indeks kepuasan layanan internal cenderung stabil yakni di kisaran nilai 3,9.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,1 Indeks	3,9 Indeks	125,8

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian indeks kepuasan layanan internal yang diperoleh pada tahun 2023 telah melebihi kedua target tersebut, yaitu 3,9 indeks.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional untuk indikator ini hanya ada pada Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya beberapa peningkatan dalam hal layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagaimana berikut:

- Terkait budaya organisasi dan sistem anti korupsi, sebagai langkah awal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melaksanakan Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly secara virtual. Sebagai tindak lanjutnya, Kantor Wilayah telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Satgas Saber Pungli serta Unit Pemilik Risiko yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Susunan tim yang telah dibentuk rutin melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan antikorupsi, mulai dari Sosialisasi SPIP, Manajemen Risiko dan Pembangunan Budaya Antikorupsi, Penyuluhan Gerakan Antikorupsi dan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga melakukan Penguatan dan Pendampingan WBK/WBBM serta Manajemen Risiko ke Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.
- Dalam hal integritas kerja terkait pengelolaan SDM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melakukannya melalui banyak cara, salah satunya melalui kegiatan revolusi mental.
- Kepala Kantor Wilayah selaku pimpinan tertinggi juga tak henti-hentinya memberikan penguatan dan internalisasi kepada seluruh pegawai agar melakukan pelayanan berdasarkan integritas.
- Integritas kerja pegawai juga dapat dilihat dari peningkatan disiplin pegawai berdasarkan tingkat kehadiran. Peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dapat dilihat dari data persentase tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Tabel 10. Kedisiplinan Pegawai Berdasarkan Kehadiran

No.	Periode Rekapitulasi	Jumlah Pegawai	Tingkat Kehadiran (%)
1.	23 Desember 2022 s/d 22 Januari 2023	192 Orang	97,39
2.	23 Januari 2023 s/d 22 Februari 2023	194 Orang	96,39
3.	23 Februari 2023 s/d 22 Maret 2023	193 Orang	96,37

No.	Periode Rekapitulasi	Jumlah Pegawai	Tingkat Kehadiran (%)
4.	23 Maret 2023 s/d 22 April 2023	194 Orang	96,39
5.	23 April 2023 s/d 22 Mei 2023	191 Orang	96,33
6.	23 Mei 2023 s/d 22 Juni 2023	191 Orang	91,10
7.	23 Juni 2023 s/d 22 Juli 2023	191 Orang	93,71
8.	23 Juli 2023 s/d 22 Agustus 2023	191 Orang	95,81
9.	23 Agustus 2023 s/d 22 September 2023	191 Orang	94,24
10.	23 September 2023 s/d 22 Oktober 2023	189 Orang	97,88
11.	23 Oktober 2023 s/d 22 November 2023	189 Orang	93,12

- Terkait integritas dalam pelaksanaan anggaran, salah satunya telah didukung dengan adanya digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. E-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. Dengan adanya e-katalog, pelayanan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan cepat serta aman dari penyalahgunaan. Di samping itu, e-katalog dapat mendukung pelaku usaha lokal yang menengah atas dan bawah untuk menawarkan produk mereka, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Terkait integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah menerapkan sistem *reward and punishment* kepada pegawai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah membentuk tim penilai kinerja individu pegawai dan memberikan *reward* bagi pegawai yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan *reward*. Adapun kriteria tersebut adalah berdasarkan absensi dan kehadiran saat apel pagi dan sore, kedisiplinan dalam memakai pakaian dinas, serta sikap dan perilaku saat jam dinas.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan nilai hasil survey, pimpinan senantiasa melakukan penguatan dan internalisasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada publik. Selain itu, untuk mengoptimalkan jumlah responden survey, pimpinan senantiasa menginformasikan dan mengingatkan para pegawai untuk mengisi survey integritas internal organisasi dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di setiap akhir bulan. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai maupun media *WhatsApp Group* Kantor Wilayah.

- Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan/Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Capaian Kinerja pada Divisi Pemasyarakatan terbagi menjadi 9 Sasaran Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan/Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 indeks	98, 54 indeks	120,17
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	97,4%	108,2
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	91,7%	101,9
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	90%	100
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%	142,85
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117,6
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	94,8%	111,52
		Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	97,98%	576,29
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	18,7%	60,3

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	76,8%	106,7
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	92,10%	115,12
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	73,6%	122,7
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	94,7%	172,18
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	62%	177,14
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	96,11%	106,79
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	90,32%	106,25
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	96,5%	120,62
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	85%	94,80%	111,52

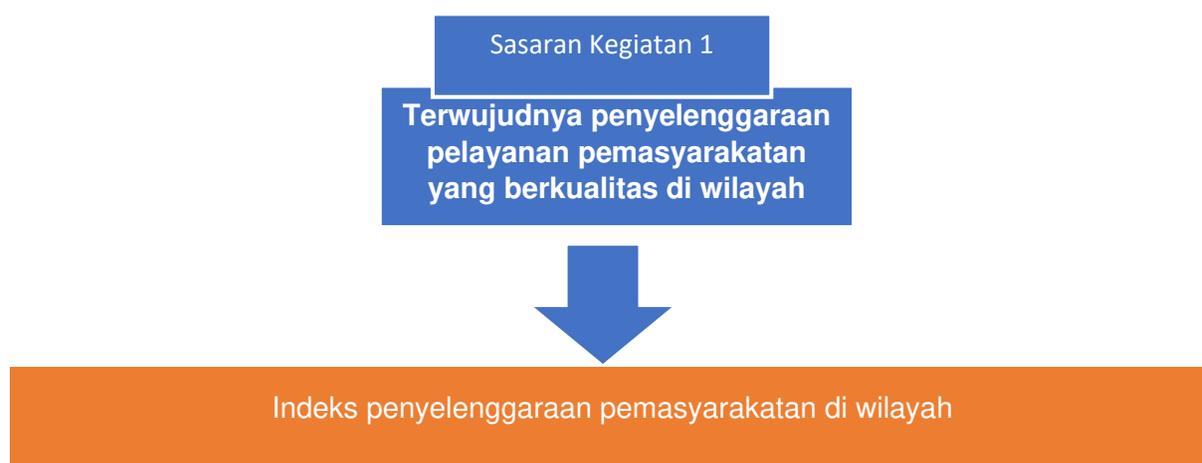
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib			
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	98,58%	123,22
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	90,90%	106,94
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	96,55%	120,68
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85,86%	101
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	96,55%	120,68
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/ anak sesuai dengan standar	80%	100%	125
		Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38
		Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09
		Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	92,63%	108,97
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	77,92%	97,4
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	68,65%	254,26

Adapun rincian capaian dari masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah

Gambar 5. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: “Indeks penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82 indeks	98,54 indeks	120,17

Nilai indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan melalui aplikasi survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, yaitu dengan nilai rata-rata 98,54.

Tabel 13. Rekapitulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI
1.	Lapas Kelas I Palembang	99,75
2.	LPKA Klas I Palembang	100
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	99,5
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	99,5
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	98,5
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	100
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	99
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	96
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	100
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	100
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	99,5
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	96
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	100
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	98
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	99,75
16.	Lapas Kelas III Surulungun Rawas	93
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	97,75
18.	Rutan Kelas I Palembang	100
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	100
20.	Rutan Kelas II Baturaja	94,75
21.	Bapas Kelas I Palembang	96,5
22.	Bapas Kelas II Lahat	98,5
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	97,75
24.	Bapas Kelas II Muratara	98,5
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	99,75
26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	100
RATA-RATA		98,54

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	-	-	-	80	80	100	-	-	-	82	98,54	120,17

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator kinerja indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2022.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82 indeks	82 indeks	98,54 indeks	120,17

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

- Penyebab keberhasilan

- Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah berlaku di UPT Masyarakatan tersebut;
- Melakukan terobosan inovasi pada Lapas/Rutan/LPKA/Rupbasan/Bapas yang mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui informasi layanan yang ada;
- Pengawasan terhadap UPT Masyarakatan yang sudah berjalan dengan baik;
- Keikutsertaan pihak terkait untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat yang membuat penyelenggaraan di UPT Masyarakatan terus membaik.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan survei yang dilakukan Indeks Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah terhadap UPT Masyarakatan Tahun 2023 diperoleh Nilai 98,54. Artinya Kualitas penyelenggaraan pada UPT masyarakatan berjalan dengan baik, sehingga kinerja masyarakatan di wilayah kerja Divisi Masyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pencapaian hasil survei ini diperoleh dari pengukuran terhadap layanan publik yang dilakukan seperti layanan kunjungan di Lapas/Rutan, pemberian layanan Integrasi serta fasilitas yang terdapat di Lapas/Rutan/LPKA/Rupbasan/Bapas.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar

Gambar 6. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: “Persentase menurunnya tahanan yang overstaying”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	97,4%	108,2

Persentase menurunnya tahanan yang *overstaying* dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan overstaying}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{2500}{2566} \times 100\% = 97,4\%$$

Data jumlah tahanan *overstaying* didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	-	-	-	80%	80%	100	80%	35%	43,75	90%	97,4%	108,2

Berdasarkan hasil perbandingan, realisasi persentase menurunnya tahanan yang overstaying meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 lalu.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	90%	97,4%	108,2

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan berdasarkan data capaian tahun 2023 target untuk indikator ini hampir tercapai, yakni telah terealisasi sebesar 97,4% dari target 108,2%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator menurunnya tahanan yang *overstaying* tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Telah dilakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum yang berwenang sehingga dapat menurunkan tahanan yang *overstaying* yang ada pada Lapas/Rutan walaupun belum bisa menurunkan secara keseluruhan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum di bidang pelayanan tahanan. Kegiatan bertujuan dalam rangka penguatan serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan masyarakat di bidang pelayanan tahanan.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	91,7%	101,9

Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{2352}{2566} \times 100\% = 91,7\%$$

Data jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	-	-	-	70 %	70 %	100	80 %	73,4 %	91,75	90 %	91,7%	101,9

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum mengalami peningkatan dari tahun 2022.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	90%	91,7%	101,9

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian indikator kinerja persentase tahanan yang

memperoleh layanan penyuluhan hukum telah melebihi target yakni sebesar 91,7% dari target 90%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Salah satu penyebab keberhasilan adalah kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi lainnya dalam melakukan penyuluhan hukum terhadap WBP, sehingga itu dapat dilihat sebagai pembinaan WBP agar menjadi lebih baik lagi.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pelaksanaan indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum adalah bekerja sama dengan instansi lain sehingga kita dapat melakukan penyuluhan terhadap WBP lebih baik, serta memberikan pembinaan keagamaan untuk membina Warga Binaan agar mereka memahami tentang agama, belajar mengaji serta mendengarkan ceramah agar mereka sadar akan kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga mereka dapat berbenah diri menjadi lebih baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.3: Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	90%	100

Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{2311}{2566} \times 100\% = 90\%$$

Data jumlah tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	-	-	-	70 %	70 %	100	80 %	23,7 %	29,5	90 %	90 %	100

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, capaian pada Tahun 2023 telah mencapai target. Adapun pada tahun 2020, tidak terdapat indikator persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Perjanjian Kinerja.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%	90%	90%	100

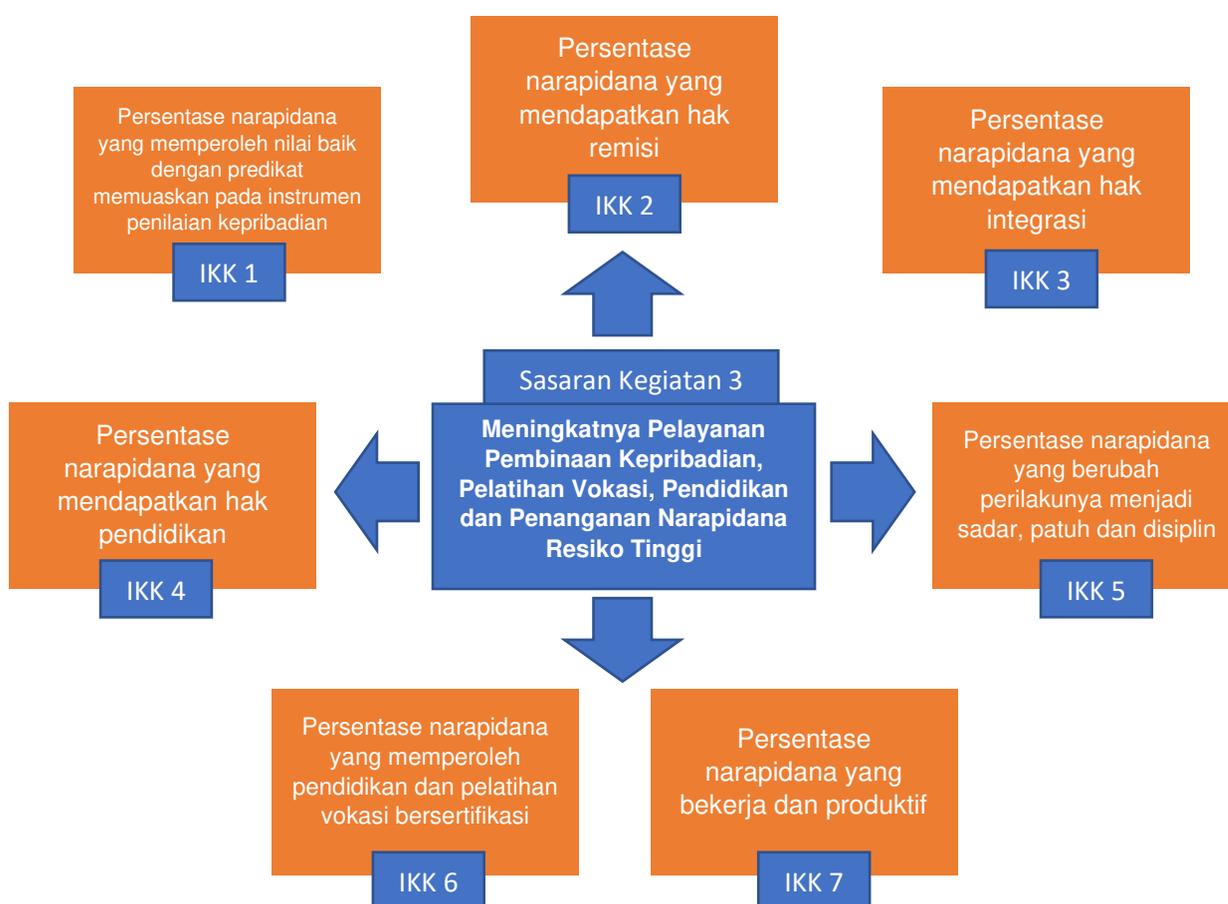
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum telah mencapai target yaitu sebesar 90%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
 Indikator kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
 Tercapainya target pada indikator ini didukung oleh sinergi yang baik antara UPT Pemasarakatan dan Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dalam hal ini, Divisi Pelayanan Hukum menjadi jembatan antara klien pemasarakatan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
 Salah satu hal yang menunjang pelaksanaan indikator ini adalah kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum itu

sendiri merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.



Gambar 7. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 25. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada	70%	100%	142,85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		instrumen penilaian kepribadian			

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah napi yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen kepribadian}}{\text{Jumlah napi resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan}} \times 100\%$$

$$\frac{85}{85} \times 100\% = 100\%$$

Data narapidana yang memperoleh nilai baik pada instrument penilaian kepribadian didapatkan melalui SDP dan rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	-	-	-	60 %	60 %	100	65 %	104 %	160	70%	100 %	142,85

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, indikator kinerja persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun capaian pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 27. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	70%	100%	142,85

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian indikator ini telah memenuhi target, yakni 100% dari target 70%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pembinaan dari seluruh petugas, penegakan aturan disiplin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan berbagai pola pembinaan kepada seluruh narapidana.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Pencapaian pada indikator kinerja ini berkaitan dengan pemberian pembinaan yang baik dari seluruh petugas baik kepribadian atau kemandirian. Penegakan hukuman yang tegas, sehingga menyebabkan narapidana cenderung menghindari perbuatan yang buruk dan terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik. Sehingga pada saat penilaian pada Sistem Penilaian Narapidana (SPPN) para wali masyarakatan memberikan nilai yang baik.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2: Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah napi yang mendapatkan hak remisi}}{\text{Jumlah napi resiko tinggi yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan remisi}} \times 100\%$$

$$\frac{21099}{21099} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	-	-	-	97%	97%	100	98%	100%	102	99%	100%	101

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi cenderung stabil dengan capaian 100%. Adapun pada tahun 2020, indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 30. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99%	100%	101%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi memiliki target yang sama yaitu 99% dan pada Tahun 2023 telah tercapai 100%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi meningkat dipengaruhi oleh pemenuhan syarat administrasi dan substantif narapidana/anak yang sudah lengkap, kelakuan baik narapidana dan penilaian oleh wali pemasyarakatan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pemenuhan syarat administratif dan substantif oleh seluruh narapidana dan terintegrasi langsung oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pemenuhan berkas pendukung oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Ditambah dengan lembar penilaian yang dinilai baik oleh para wali pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.3: Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117,6

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah napi yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah napi yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

$$\frac{4861}{4861} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	-	-	-	75 %	75 %	100	80 %	100 %	125	85 %	100 %	117,6

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terdapat kenaikan target pada indikator narapidana yang mendapatkan hak integrasi, adapun capaian yang diperoleh adalah 100%. Pada tahun 2020, tidak terdapat indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	100%	117,6

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi telah melampaui target yaitu 100% dari target 85%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi meningkat dipengaruhi oleh pemenuhan syarat administrasi dan substantif narapidana. kelakuan baik narapidana dan penilaian oleh wali pemasyarakatan
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Pemenuhan syarat administratif dan susbtantif oleh seluruh narapidana dan terintegrasi langsung oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pemenuhan berkas pendukung oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Ditambah dengan lembar penilaian yang dinilai baik oleh para wali pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.4: Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	94,8%	111,52

Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah napi yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah napi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$\frac{1339}{1412} \times 100\% = 94,8\%$$

Data jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	-	-	-	75 %	75 %	100	80 %	66, 92%	83, 65	85 %	94, 8%	111, 52

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan mengalami fluktuasi capaian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	85%	94,8%	111,52

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan telah memenuhi target yaitu 94,8% dari target 85%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

- Penyebab keberhasilan

Salah satu penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah dikarenakan adanya pemberian pendidikan standar oleh petugas bekerja sama dengan mahasiswa magang dari berbagai universitas di Palembang dan berupaya memberikan

pembinaan terhadap Warga Binaan secara optimal serta melakukan pendekatan terhadap Warga Binaan dengan melakukan pendidikan yang berkualitas dengan bekerjasama dengan membentuk PKBM Paket A, B, dan C.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan, tidak terlepas dari pendataan dari seksi pembinaan narapidana dan anak didik terhadap seluruh narapidana. Pemberian pendidikan standar seperti baca, tulis dan menghitung oleh pegawai serta menyediakan pojok baca untuk mengembangkan potensi baca bagi narapidana.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.5: Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	97,98%	576,29

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah napi resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin}}{\text{Jumlah napi resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan}} \times 100\%$$

$$\frac{436}{445} \times 100\% = 97,98\%$$

Data jumlah narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	-	-	-	13 %	13 %	100	15 %	100 %	666,67	17 %	97,98%	576,29

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Narapidana Resiko Tinggi													

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, realisasi kinerja untuk indikator persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin mengalami sedikit kenaikan seiring dengan target yang meningkat setiap tahunnya. Untuk periode Tahun 2023, telah dicapai sebesar 97,98% dari target 17%.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Disiplin Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	17%	97,98%	576,29

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah jauh melampaui target yaitu sebesar 97,98% dari target 17%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin meningkat dengan penegakan aturan disiplin yang sesuai dengan standar operasional prosedur dan pengawasan petugas yang lebih intensif.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin, tidak terlepas dari pemberian hukuman yang sesuai dengan standar kepada narapidana yang melanggar aturan. Pengawasan petugas yang baik sehingga narapidana terdorong untuk lebih patuh dan disiplin.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.6: Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	18,7%	60,3

Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dihitung dengan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{2477}{13267} \times 100\% = 18,7\%$$

Data jumlah narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	100 %	104,62%	104,62	25%	25%	100	28%	17%	61	31%	18,7 %	60,3

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target untuk indikator kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi mengalami kenaikan setiap tahun. Akan tetapi realisasi kinerja Tahun 2023 masih belum dapat memenuhi target. Adapun realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 18,7% dari target 31%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	31%	18,7%	60,3

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi belum dapat memenuhi target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab kegagalan

Pada periode Tahun 2023, indikator kinerja narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tidak mencapai target. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya anggaran pelatihan, terbatasnya sarana kerja Warga Binaan yang masih layak digunakan kembali, serta kurangnya minat Warga Binaan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan vokasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi, berhubungan dengan pemberian pembinaan kepribadian yang baik oleh seksi kegiatan kerja pada setiap UPT Pemasarakatan dan instansi terkait dalam pemberian pelatihan dan penerbitan sertifikat sebagai bukti bahwa narapidana tersebut telah mengikuti dan mahir dalam pelatihan kegiatan tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.7: Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	76,8%	106,7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Narapidana Resiko Tinggi				

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$\frac{510}{664} \times 100\% = 76,8\%$$

Data jumlah narapidana yang bekerja dan produktif didapatkan melalui SDP dan rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	-	-	-	62 %	62%	100	67 %	58,5 %	88	72%	76,8%	106,7

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, seiring dengan target yang meningkat setiap tahun, realisasi kinerja untuk indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, realisasi kinerja tersebut sudah memenuhi target, yakni tercapai sebesar 76,8% dari target 72%.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	72%	76,8%	106,7

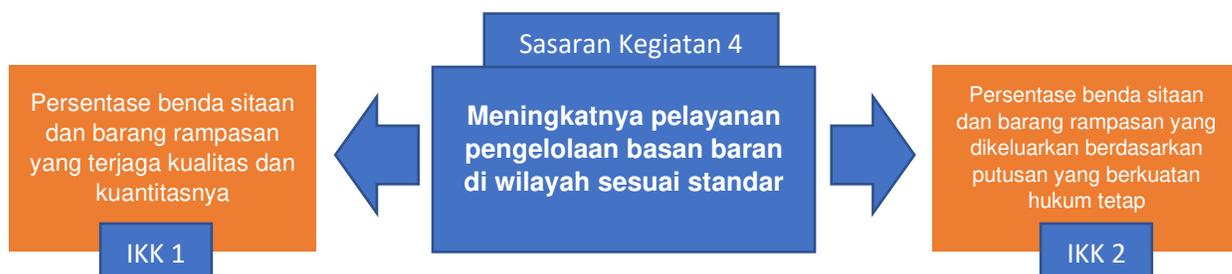
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah memenuhi target yaitu tercapai 76,8% dari target 72%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Capaian kinerja untuk indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah mencapai target didukung oleh pemberian program pembinaan kepribadian dan memperhatikan perhitungan narapidana yang sudah layak untuk bekerja secara produktif.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Persentase narapidana yang bekerja secara produktif, tidak lepas dari pola pembinaan kepribadian oleh petugas Lapas/Rutan dengan memperhatikan kepribadian narapidana dan syarat substantif administratif sehingga bisa diberikan kegiatan kerja yang baik.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar



Gambar 8. Sasaran Kegiatan 4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 4.1: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi lelang basan baran}}{\text{Jumlah penilaian depresiasi basan baran}} \times 100\%$$

$$\frac{278}{278} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah benda sitaan dan barang rampasan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	-	-	-	60%	60%	100	70%	97%	135	80 %	100 %	125

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, seiring dengan target yang meningkat setiap tahunnya, realisasi kinerja indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya juga meningkat. Pada periode Tahun 2023, telah terealisasi sebesar 100% dari target 80%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	80%	100%	125

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya telah melampaui target yaitu 100% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya tercapai karena pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dengan melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan indikator ini tidak terlepas dari adanya dasar hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Indikator Kinerja Kegiatan 4.2: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	92,10%	115,12

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah benda sitaan yang telah eksekusi}}{\text{Jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$
$$\frac{175}{190} \times 100\% = 92,10\%$$

Data jumlah benda sitaan dan barang rampasan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	-	-	-	40 %	40 %	100	60%	100 %	166	80%	92,10%	115,12

Sebagaimana pada tabel di atas, realisasi kinerja untuk indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	80%	92,10%	115,12

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap telah melampaui target yakni sebesar 92,10% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

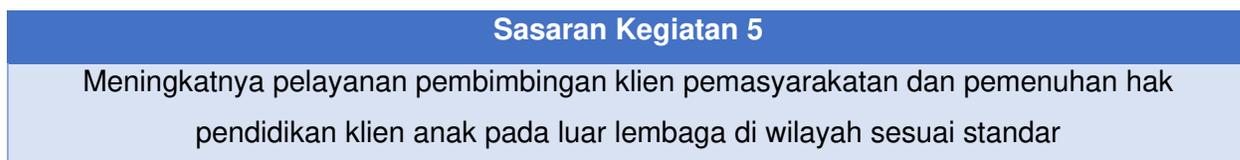
Indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

- Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap basan dan baran yang telah memiliki kekuatan hukum;
- Mengadakan penilaian basan baran dengan pihak-pihak terkait;
- Melakukan lelang basan baran yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Memusnahkan basan baran yang dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Optimalisasi tata kelola Rupbasan dalam pelayanan penyimpanan, pengelolaan dan perawatan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dititipkan oleh penegak hukum dan guna memberikan perlindungan terhadap aset negara.



Gambar 9. Sasaran Kegiatan 5 Direktorat Jenderal Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 5.1: Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 52. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	73,6%	122,7

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dihitung dengan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga}}{\text{Jumlah klien usia produktif}} \times 100\%$$

$$\frac{4347}{5904} \times 100\% = 73,6\%$$

Data jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis

Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	-	-	-	40 %	40 %	100	50 %	64 %	128	60%	73,6%	122,7

Sebagaimana pada tabel di atas, realisasi kinerja untuk indikator persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga mengalami fluktuasi. Pada periode Tahun 2023, diperoleh realisasi kinerja sebesar 73,6% dari target 60%.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 54. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60%	73,6%	122,7

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga telah melampaui target yaitu sebesar 73,6% dari target 60%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
 Indikator kinerja persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian dari indikator persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga adalah:

- Tersedianya laporan data klien masyarakatan pada register pembimbingan;
- Peningkatan disiplin kerja pegawai Bapas;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembimbingan serta pengawasan kepada klien masyarakatan;
- Sinergitas klien masyarakatan dengan pihak Pembimbing Masyarakatan terkait wajib lapor.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Meningkatkan peran PK dalam pengawasan terhadap klien masyarakatan untuk kooperatif;
- Meningkatkan peran PK dalam pembimbingan terhadap klien masyarakatan agar lebih siap dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi;
- Perlunya peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK BKO, Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat menghadapi klien.

Indikator Kinerja Kegiatan 5.2: Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 55. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	94,7%	172,18

Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara}}{\text{Jumlah pendampingan anak}} \times 100\%$$

$$\frac{126}{133} \times 100\% = 94,7\%$$

Data jumlah kanak yang mendapatkan putusan pidana penjara tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
- Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	-	-	-	50 %	50 %	100	60 %	63 %	105	55 %	94,7%	172,18

Sebagaimana pada tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat penurunan target untuk indikator kinerja persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara yakni dari target 2022 sebesar 60% menjadi 55%. Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2023 telah memenuhi target, yakni tercapai sebesar 94,7% dari target 55%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
- Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	55%	94,7%	172,18

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara telah memenuhi target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa hal, di antaranya:

- Peningkatan disiplin kerja pegawai/petugas Pada Lapas/Rutan/Bapas;
- Penyelesaian Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) tepat waktu;
- Sinergitas klien anak, anak korban, dan orang tua dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan semakin baik;
- Terlaksananya pendampingan diversifikasi, mediasi, dan sidang Pengadilan Negeri.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut melalui:

- Meningkatkan peran PK dalam pendampingan dan pengawasan terhadap klien Anak dalam melaksanakan diversifikasi, mediasi serta sidang Pengadilan Negeri 20;
- Peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK BKO, Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat menghadapi klien Anak;
- Peningkatan koordinasi melalui monitoring dan evaluasi dengan pihak terkait (Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNNK, Peksos, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Indikator Kinerja Kegiatan 5.3: Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	62%	177,14

Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah anak yang melanjutkan pendidikan}}{\text{Jumlah klien anak}} \times 100\%$$

$$\frac{85}{137} \times 100\% = 62\%$$

Data jumlah klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 59. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	90 %	98,60%	109,56	25 %	25%	100	30%	30,4%	101	35%	62%	177,14

Sebagaimana pada tabel di atas, target dan capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

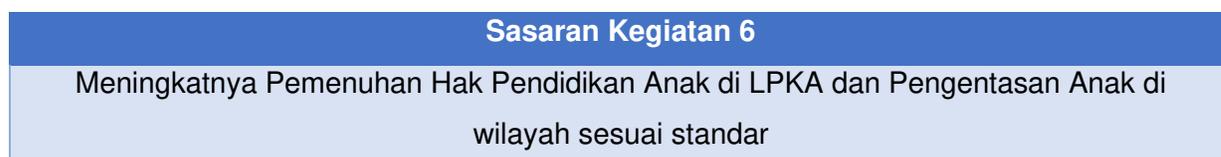
Tabel 60. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	35%	62%	177,14

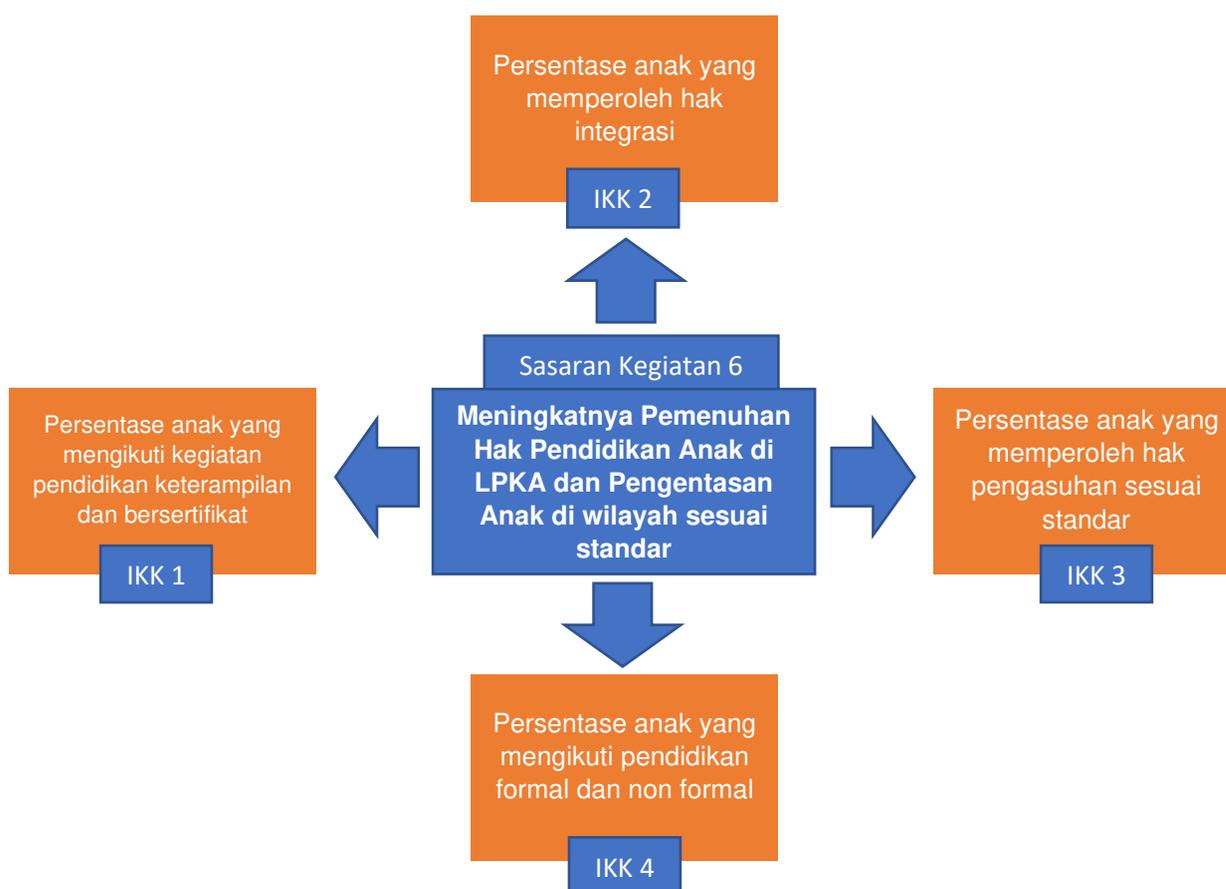
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi indikator kinerja persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya telah mencapai target. Adapun realisasi kinerja yang telah dicapai selama periode Tahun 2023 adalah 62% dari target 35%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya sosialisasi tentang pendidikan ke anak binaan dan klien anak tentang pentingnya hak mereka untuk memperoleh pendidikan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut di antaranya:

- Memberi pengetahuan kepada orang tua klien anak terkait pentingnya pendidikan bagi anak;
- Meningkatkan peran PK dalam pendampingan dan pengawasan terhadap klien anak selama pelaksanaan PB, CB, dan asimilasi.
- Peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK BKO, Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat menghadapi klien anak
- Peningkatan koordinasi melalui monitoring dan evaluasi dengan pihak terkait (Dinas Pendidikan) setempat.



Gambar 10. Sasaran Kegiatan 6 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 6.1: Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125

Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah anak yang terampil}}{\text{Jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan}} \times 100\%$$

$$\frac{65}{65} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	-	-	-	70%	70%	100	75 %	62,5 %	83	80%	100 %	125

Sebagaimana pada tabel di atas, seiring dengan target yang meningkat, realisasi kinerja indikator persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat juga mengalami kenaikan. Pada periode Tahun 2023, telah tercapai realisasi sebesar 100% dari target 80%.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan	80%	80%	100%	125

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
	Anak di wilayah sesuai standar	keterampilan dan bersertifikat				

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat telah melampaui target yaitu sebesar 100% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikasi meningkat dikarenakan pemberian program pembinaan kepribadian dan narapidana yang diberikan asimilasi untuk bekerja di Lapas/Rutan/LPKA telah berhasil mengumpulkan pemasukan yang akan disetorkan sebagai PNBPN, meski target PNBPN tahun ini belum maksimal, Namun narapidana tersebut dinilai telah menjalankan tugas dengan baik serta mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran digunakan dengan baik sehingga program pelatihan untuk WBP dapat terselenggarakan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikasi, berhubungan dengan pemberian pembinaan kepribadian yang baik oleh seksi kegiatan kerja pada setiap UPT Masyarakat dan instansi terkait dalam pemberian pelatihan dan penerbitan sertifikat sebagai bukti bahwa Anak tersebut telah mengikuti dan mahir dalam pelatihan kegiatan tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.2: Persentase anak yang memperoleh hak integrasi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 64. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100

Persentase anak yang memperoleh hak integrasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah anak yang memperoleh hak integrasi}}{\text{Jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan integrasi}} \times 100\%$$

$$\frac{56}{56} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah anak yang memperoleh hak integrasi tersebut didapatkan melalui SDP dan rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 65. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	-	-	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100%	100

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase anak yang memperoleh hak integrasi telah mencapai target, yaitu sebesar 100%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pemenuhan syarat administrasi dan substantif narapidana, kelakuan baik anak, dan penilaian yang dilakukan oleh wali pemsarakatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pemenuhan syarat administratif dan substantif oleh seluruh anak dan terintegrasi langsung oleh Sistem Database Masyarakat (SDP), pemenuhan berkas pendukung oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Ditambah dengan lembar penilaian yang dinilai baik oleh para wali masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.3: Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 67. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11

Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$$

$$\frac{161}{161} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 68. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	-	-	-	70%	70%	100	80%	100 %	125	90 %	100 %	111, 11

Sebagaimana pada tabel di atas, target setiap tahun mengalami kenaikan sedangkan realisasi kinerja cenderung stabil dan memenuhi target, yakni tercapai 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	90%	100%	111,11

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar sudah melampaui target, yaitu tercapai 100% dari target 90%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dapat mencapai target dikarenakan Lapas/Rutan/LPKA selalu berupaya memberikan pembinaan terhadap anak didik pasyarakatatan secara optimal serta melakukan pendekatan terhadap anak didik pasyarakatatan dengan melakukan konseling.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Wali pasyarakatatan yang melaksanakan pengasuhan kepada andikpas dengan melakukan pendampingan selama andikpas menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, maupun keluarga. Di samping itu, juga melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan konseling bagi anak yang keliru tentang apa yang diyakini oleh anak tersebut (terkait masalah pribadi) sehingga program pengasuhan di LPKA berjalan dengan baik. Wali dan asisten wali memberikan penilaian per triwulan untuk andik dibawah usia 18 tahun dengan menggunakan instrument penilaian pengasuhan anak dididik pasyarakatatan LPKA, dan untuk anak didik pasyarakatatan usia 18 tahun ke atas memberikan penilaian sebulan sekali menggunakan SPPN (Sistem Penilaian pembinaan Narapidana) sebagai data dukung laporan perkembangan pembinaan.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.4: Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	96,11%	106,79

Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah anak yang memperoleh hak pendidikan formal dan non formal}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$$

$$\frac{99}{103} \times 100\% = 96,11\%$$

Data jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan tersebut didapatkan melalui SDP dan rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	-	-	-	70%	70%	100	80%	80,4 %	100	90%	96,11%	106,79

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator kinerja persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada tahun 2021 sampai dengan 2022 target mengalami kenaikan dan capaian cenderung stabil. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi kinerja mengalami sedikit kenaikan.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

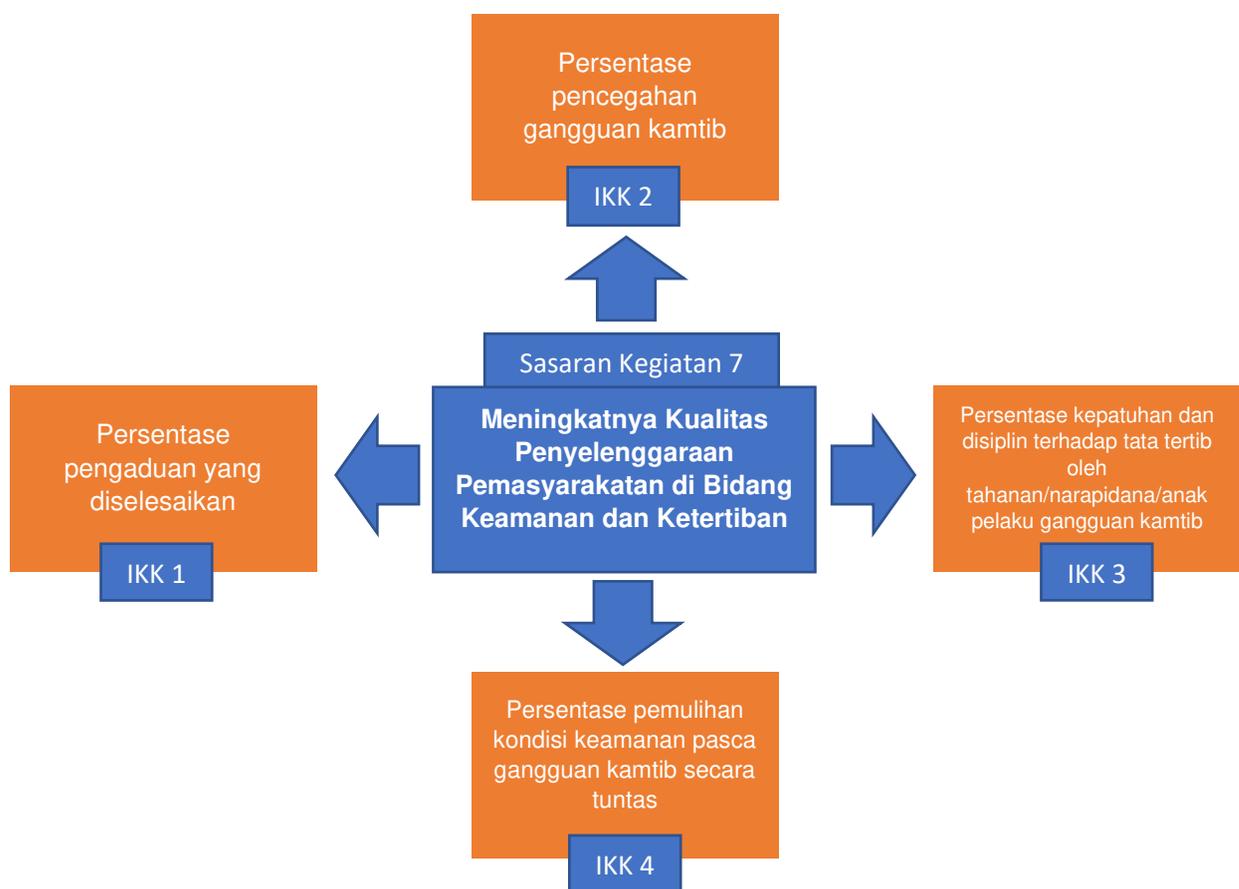
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	90%	96,11%	106,79

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya kerjasama dengan pihak ketiga khususnya yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini ditunjang oleh pelaksanaan sosialisasi kepada Warga Binaan untuk selalu mengikuti kegiatan sekolah paket di Lapas, serta koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap Warga Binaan.

Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Gambar 11. Sasaran Kegiatan 7 Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 7.1: Persentase pengaduan yang diselesaikan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 73. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	90,32%	106,25

Persentase pengaduan yang diselesaikan dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{28}{31} \times 100\% = 90,32\%$$

Data jumlah pengaduan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	80 %	100 %	125	85%	90,32%	106,25

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pengaduan yang diselesaikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Diselesaikan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	85%	90,32%	106,25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
	Keamanan dan Ketertiban					

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang diselesaikan telah melampaui target, yaitu tercapai 90,32% dari target 85%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Persentase pengaduan yang diselesaikan pada tahun ini sudah semakin membaik dikarenakan setiap aduan yang disampaikan kepada UPT Pemasarakatan ditindaklanjuti secara jelas dan informati dan dilakukan pengawasan dan kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan Kepala Lapas untuk memastikan layanan pengaduan ditindaklanjuti dengan baik.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Persentase pengaduan yang diselesaikan sudah sangat baik karena saat ini pihak Lapas/Rutan menyediakan tempat aduan yang proporsional baik secara langsung, tertulis atau lewat media sosial. Setiap aduan akan di sampaikan dan ditindaklanjuti bersama dan diberikan penjelasan yang baik kepada warga binaan dan masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan 7.2: Persentase pencegahan gangguan kamtib

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	96,5%	120,62

Persentase pencegahan gangguan kamtib dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{140}{145} \times 100\% = 96,5\%$$

Data jumlah gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
- Tabel 77. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	-	-	-	-	-	-	70 %	86 %	123	80%	96,5%	120,62

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator Persentase pencegahan gangguan kamtib pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 78. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	80%	96,5%	120,62

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pencegahan gangguan kamtib telah melampaui target, yakni tercapai sebesar 96,5% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Persentase pencegahan gangguan kamtib pada ini sudah baik dikarenakan pihak Lapas/Rutan berupaya meminimalisir gangguan kamtib dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk upaya preventif dan pencegahan serta secara rutin melakukan pengawasan/kontrol oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan tidak ada gangguan kamtib pada UPT Pemasarakatan Kanwil Sumatera Selatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator persentase pencegahan gangguan kamtib ditunjang oleh pihak Lapas/Rutan yang sudah melakukan koordinasi/bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan.

Indikator Kinerja Kegiatan 7.3: Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	94,80%	111,52

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dihitung dengan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan napi anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{146}{154} \times 100\% = 94,80\%$$

Data jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 80. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	-	-	-	-	-	-	80 %	100 %	125	85 %	94,80%	111,52

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit

penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	94,80%	111,52

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib telah melampaui target, yaitu tercapai sebesar 94,80% dari target 85%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib membaik dikarenakan pihak Lapas/Rutan/LPKA senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas narapidana dan melakukan pengawasan terhadap warga binaan di masing-masing blok hunian oleh petugas anggota jaga, memberikan pembinaan untuk pelaku gangguan kamtib agar merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya serta melakukan koordinasi dalam peningkatan keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan pengawasan, pemindahan narapidana.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib ditunjang oleh pihak Lapas/Rutan/LPKA yang menggiatkan razia rutin bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, pengecekan lalu lintas barang yang digunakan oleh narapidana, pengawasan yang ketat bagi petugas terhadap narapidana serta menetapkan aturan turunan sesuai dengan peraturan tentang penggunaan barang tertentu dalam Lapas/Rutan/LPKA serta keberhasilan bisa tercapai dikarenakan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara rutin maupun insidental

Indikator Kinerja Kegiatan 7.4: Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	98,58%	123,22

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{139}{141} \times 100\% = 98,58\%$$

Data jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 83. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	-	-	-	-	-	-	70%	100%	125	80%	98,58%	123,22

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 84. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	98,58%	123,22

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah melampaui target, yaitu sebesar 98,58% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dapat tercapai dikarenakan pihak Lapas/Rutan berupaya meminimalisir gangguan kamtib dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk upaya preventif dan pemulihan.

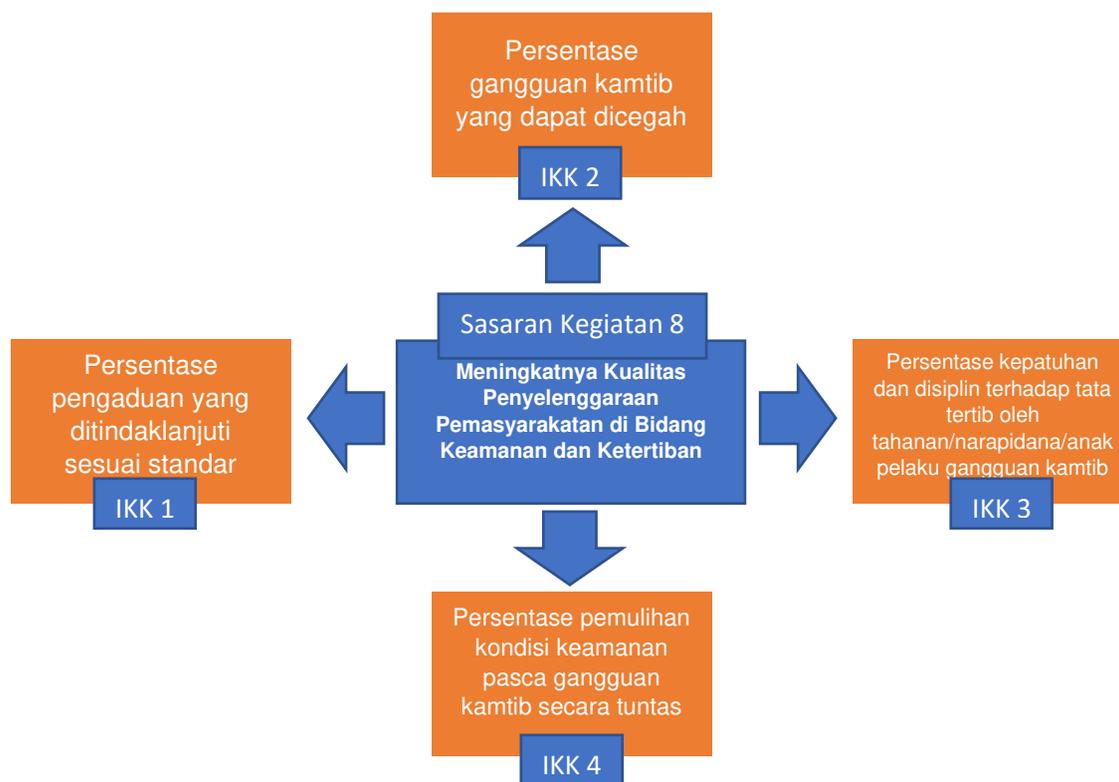
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah dengan berupaya melakukan tindakan preventif sebelum gangguan kamtib terjadi serta bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk penanggulangan dan pencegahan gangguan kamtib.

Sasaran Kegiatan 8

Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar

Gambar 12. Sasaran Kegiatan 8 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 8.1: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	90,90%	106,94

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{30}{33} \times 100\% = 90,90\%$$

Data jumlah pengaduan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 86. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	-	-	75%	75%	100	80%	100%	125	85%	90,90%	106,94

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	90,90%	106,94

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sudah melampaui target yaitu sebesar 90,90% dari target 85%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar dapat tercapai dikarenakan setiap aduan yang ditindaklanjuti secara jelas dan informatif.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini ditunjang oleh beberapa hal seperti penyediaan tempat aduan yang proporsional baik secara langsung, tertulis atau lewat media sosial. Setiap aduan akan ditampung dan ditindaklanjuti bersama dan diberikan penjelasan yang baik kepada narapidana dan masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan 8.2: Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	96,55%	120,68

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{140}{145} \times 100\% = 96,55\%$$

Data jumlah gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 89. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	-	-	-	60%	60%	100	70%	86%	123%	80	96,55%	120,68

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 90. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	96,55%	120,68

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah melampaui target yaitu sebesar 96,55% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Indikator kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dapat mencapai target dikarenakan adanya pengawasan rutin serta melakukan deteksi dini untuk mencegah gangguan kamtib.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini meliputi penggeledahan blok hunian, pengawas dan kontrol ke masing-masing blok hunian, melakukan penggeledahan terhadap barang/orang yang masuk ke Lapas dan melakukan penggeledahan secara berkala dan insidental kepada masing-masing blok hunian.

Indikator Kinerja Kegiatan 8.3: Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85,86%	101

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan napi anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{170}{198} \times 100\% = 85,86\%$$

Data jumlah pelaku gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 92. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	-	-	-	-	-	-	80%	100%	125	85%	85,86%	101

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 93. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	85,86%	101

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sudah melampaui target yaitu sebesar 85,86% dari target 85%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
 Indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dapat mencapai target dikarenakan pihak Lapas/Rutan/LPKA menggiatkan razia rutin dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas narapidana.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah pengecekan lalu lintas barang yang digunakan oleh narapidana, pengawasan yang ketat bagi petugas terhadap narapidana, serta menetapkan aturan turunan sesuai dengan peraturan tentang penggunaan barang tertentu dalam Lapas/Rutan/LPKA.

Indikator Kinerja Kegiatan 8.4: Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 94. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	96,55%	120,68

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{140}{145} \times 100\% = 96,55\%$$

Data jumlah pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 95. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	-	-	-	-	-	-	70%	88,5%	126	80%	96,55%	120,68

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
sesuai standar	secara tuntas												

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

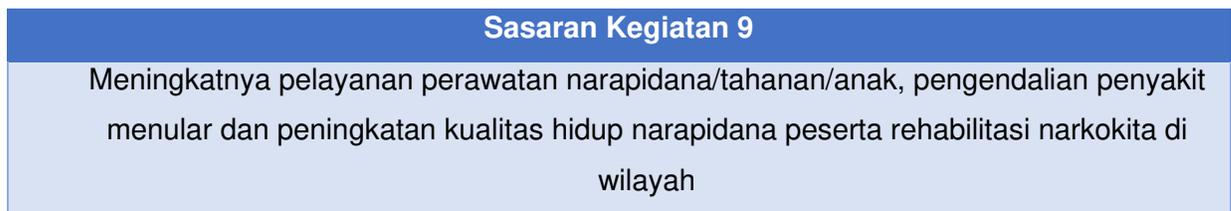
Tabel 96. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	96,55%	120,68

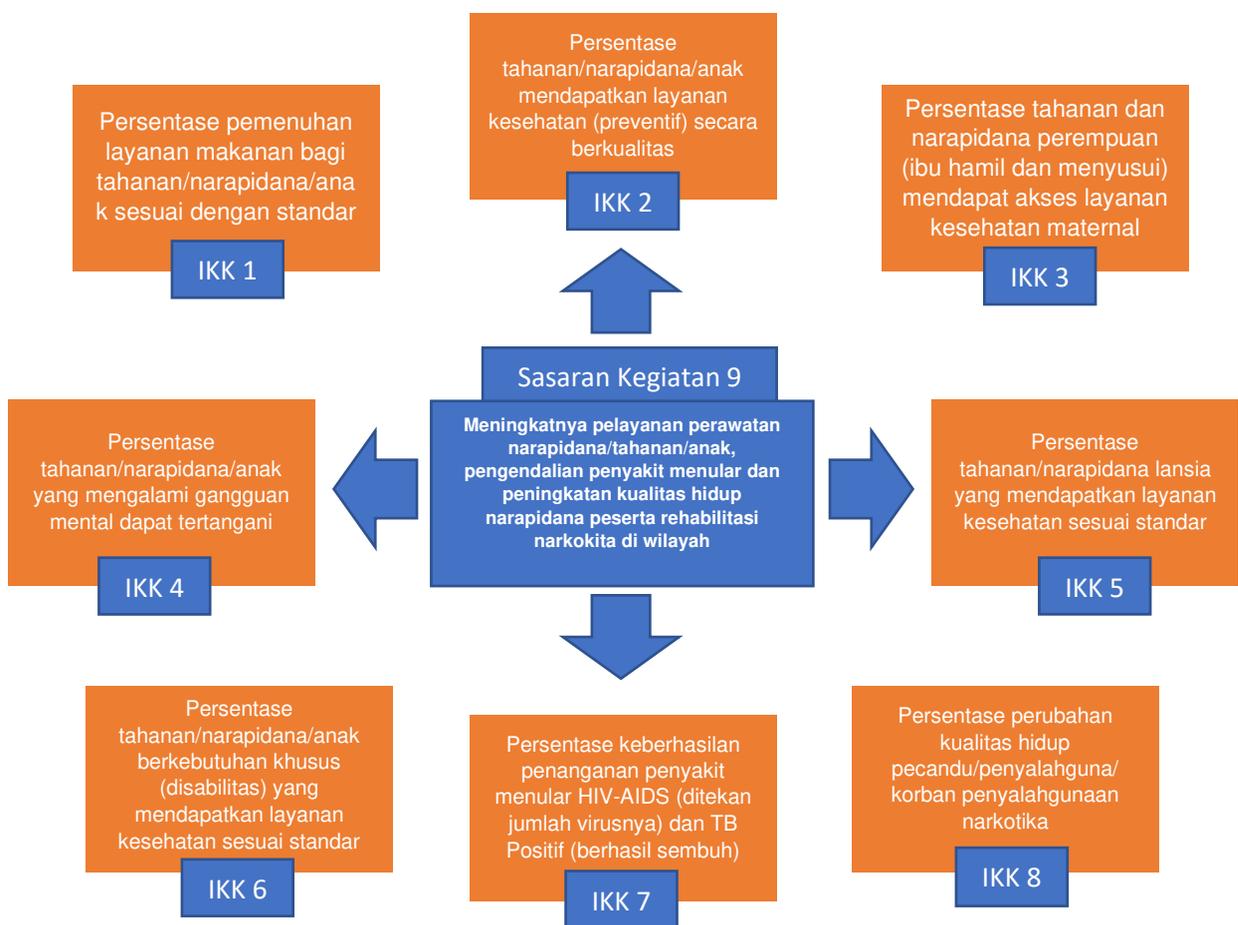
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah melampaui target, yaitu sebesar 96,55% dari target 80%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dapat tercapai dikarenakan pihak Lapas/Rutan/LPKA selalu berupaya meminimalisir gangguan kamtib dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk upaya preventif dan pemulihan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini adalah dengan berupaya melakukan tindakan preventif sebelum gangguan kamtib terjadi serta bersinergi

dengan aparat penegak hukum lainnya untuk penanggulangan dan pencegahan gangguan kamtib dan sering dilakukan razia ke blok hunian baik secara rutin maupun insidentil.



Gambar 13. Sasaran Kegiatan 9 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 9.1: Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 97. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan napi anak}}{\text{Jumlah tahanan napi anak}} \times 100\%$$

$$\frac{15995}{15995} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah pemenuhan layanan makanan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 98. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar	-	-	-	71 %	71%	100	75%	100 %	133	80%	100 %	125

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar	80%	80%	100%	125

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
	narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah					

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar telah melampaui target yaitu sebesar 100% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Keberhasilan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar dapat dicapai dengan mengawasi pelaksanaan penyusunan RKAKL di UPT Pemasarakatan melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan pagu indikatif. Perhitungan tersebut sesuai dengan biaya bahan makanan narapidana dan tahanan yang berlaku. layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak telah diberikan dengan baik serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melakukan pengolahan dan penyajian dengan baik dan telah memperoleh sertifikat laik *hygiene*.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah dengan dilakukan pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan Kepala Lapas untuk memastikan pemenuhan makanan berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.2: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	peserta rehabilitasi narkoba di wilayah				

Jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan napi anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif)}}{\text{Jumlah tahanan napi anak}} \times 100\%$$

$$\frac{15995}{15995} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 101. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	Persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	-	-	-	92%	92%	100	93%	100 %	107	94%	100 %	106,38

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang telah dicapai telah melampaui target.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 102. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	100%	106,38

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja telah terlampaui yaitu sebesar 100% dari target 94%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Optimalisasi sosialisasi dan pendataan kepemilikan kartu BPJS pada Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA serta secara rutin melakukan pengawasan terhadap perilaku pola hidup bersih dan sehat pada Warga Binaan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Upaya yang telah dilakukan pada Lapas/Rutan/LPKA diantaranya dengan giat melakukan sosialisasi serta melakukan pendataan kepemilikan kartu BPJS pada warga binaan dan pelaksanaan piket bagi pegawai klinik sehingga dapat mempermudah mereka dalam menerima layanan kesehatan baik didalam maupun diluar lapas serta dengan rutin melakukan pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak didik pemsyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.3: Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 103. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	peserta rehabilitasi narkokita di wilayah				

Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan dan napi perempuan mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan dan napi perempuan (hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah tahanan dan narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan maternal tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 104. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	-	-	-	95 %	95 %	100	96%	100%	102	97%	100%	103,09

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada tahun 2021 sampai dengan 2023, terjadi kenaikan capaian per tahun.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 105. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/	Persentase tahanan dan narapidana perempuan	97%	97%	100%	103,09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
	tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	(ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal				

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal sudah melebihi target yaitu tercapai 100% dari target 97%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas dipengaruhi oleh berupa pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan maternal, tenaga Kesehatan yang rutin memberikan edukasi tentang Kesehatan maternal dan banyaknya perhatian yang diberikan pada ibu hamil dan menyusui dari berbagai kalangan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja ini tidak lepas dari anggaran yang telah dicanangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan maternal, seperti susu hamil, vitamin dan makanan ibu hamil. Kegiatan yang mengundang perhatian masyarakat tertentu, membantu pemenuhan kebutuhan ibu hamil menyusui bahkan bayi yang saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.4: Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 106. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah				

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan dan napi yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah tahanan dan napi yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah tahanan dan narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan maternal tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 107. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	-	-	60 %	60 %	100	80 %	100 %	125	80 %	100%	125

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 108. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%	125%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator ini telah melebihi target, yaitu sudah mencapai 100% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dipengaruhi oleh pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang rutin memberikan perawatan dan rehabilitasi serta kerja sama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat terdekat.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah antara lain kerja sama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat yang khusus memberikan pelayanan tentang kejiwaan dan adanya rehabilitasi yang rutin dilaksanakan dengan pemberian obat-obatan untuk warga binaan di Lapas/Rutan/LPKA.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.5: Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 109. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	92,63%	108,97

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah				

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan dan napi lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan dan napi lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{176}{190} \times 100\% = 92,63\%$$

Data jumlah tahanan dan narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 110. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	75 %	75%	100	80 %	100 %	125	85%	92,63%	108,97

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dan juga terdapat kenaikan target.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 111. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	92,63%	108,97

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah mencapai target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target pada indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan lansia, tenaga kesehatan yang rutin memberikan perawatan khusus kepada para lansia, serta adanya kerjasama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat terdekat.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Dalam rangka menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini diperlukan beberapa hal antara lain kerja sama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat yang khusus memberikan pelayanan lansia, tersedianya fasilitas penunjang lansia seperti kamar khusus lansia, toilet khusus lansia dan pemenuhan fasilitas pendukung seperti popok, obat-obatan yang telah dianggarkan pada Lapas/Rutan.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.6: Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 112. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan	85%	100%	117,64

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	layanan kesehatan sesuai standar			

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan napi anak disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan napi anak disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Data jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 113. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	75 %	75 %	100	80 %	100 %	125	85 %	100 %	117,64

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terdapat kenaikan target.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 114. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%	117,6%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sudah melampaui target yaitu tercapai 100% dari target 85%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dipengaruhi oleh pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan disabilitas, tenaga kesehatan yang rutin memberikan perawatan khusus pada disabilitas serta kerja sama yang baik dengan pihak pelayanan kesehatan masyarakat terdekat.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah tersedianya fasilitas penunjang kegiatan disabilitas berdasarkan standar pemenuhan pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia dan pemenuhan fasilitas pendukung seperti obat-obatan, alat bantu untuk pemulihan dan terapi yang telah bekerja sama dengan rumah sakit tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.7: Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 115. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	77,92%	97,4%

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A+B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah napi dengan HIV AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah napi dengan HIV AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah napi dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah napi dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Adapun data jumlah narapidana dengan HIV AIDS dan TB Positif tersebut didapatkan melalui rekapitulasi laporan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$A = \frac{11}{14} \times 100\% = 78,57\%$$

$$B = \frac{17}{22} \times 100\% = 77,28\%$$

Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(78,57\% + 77,28\%)}{2} \times 100\% = 77,92\%$$

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
- Tabel 116. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	-	-	60 %	60 %	100	70 %	100 %	125	80%	77,9 2%	97,4

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, indikator kinerja kegiatan ini tidak memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 117. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80%	77,92%	97,4

Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) terealisasi sebesar 77,92% atau dengan kata lain tidak dapat memenuhi target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab kegagalan
Tidak tercapainya target indikator kinerja kegiatan persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virus) dan TB positif (berhasil sembuh), salah satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman Warga Binaan tentang penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Adapun hal-hal yang menunjang pelaksanaan indikator kinerja ini adalah fasilitas penunjang kegiatan pengobatan dan usaha preventif dari para tenaga kesehatan kepada warga binaan yang memiliki penyakit menular serta obat-obatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 9.8: Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 118. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	68,65%	254,26

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah perubahan kualitas hidup napi narkotika secara tuntas}}{\text{Jumlah napi narkotika yg mendapat layanan rehabilitasi}} \times 100\%$$

$$\frac{357}{520} \times 100\% = 68,65\%$$

Jumlah perubahan kualitas hidup napi narkotika secara tuntas diperoleh dari jumlah warga binaan peserta rehabilitasi yang mengalami kenaikan skor kualitas hidup di Semester II, dengan rincian sebagai berikut.

Rehabilitasi medis : 39 orang

Rehabilitasi sosial : 318 orang

Sedangkan jumlah napi narkotika yang mendapat layanan rehabilitasi diperoleh dari jumlah seluruh peserta rehabilitasi di UPT Pas yang ditunjuk oleh Ditjenpas melalui Ditkeswathab, dengan rincian sebagai berikut.

Rehabilitasi medis : 60 orang

Rehabilitasi sosial : 460 orang

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 119. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	-	-	-	-	-	-	25%	12,06%	48,24	27%	68,65%	254,26

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah													

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 120. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	68, 65%	254, 26

Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika telah terealisasi sebesar 68,65% dan telah melampaui target yaitu 27%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh adanya rehabilitasi medis dan sosial yang setiap tahun diadakan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

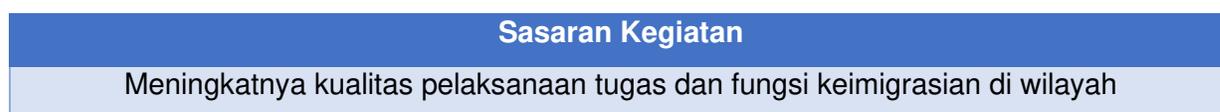
Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kegiatan rehabilitasi medis dan sosial yang rutin dilakukan setiap tahunnya, bekerja sama dengan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia sebagai media pengajar. Konselor yang membimbing warga binaan agar sembuh dari pecandu penyalahgunaan narkoba. Penempatan kamar yang sesuai dengan jenis pidana dan adanya hukuman yang dijalankan sesuai standar operasional prosedur.

- Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Imigrasi

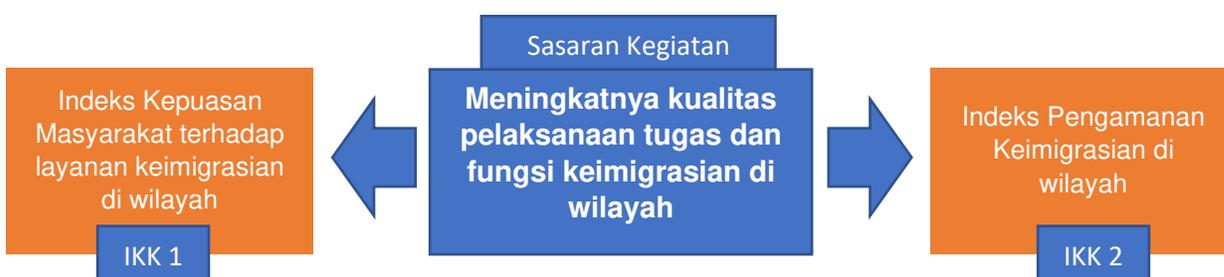
Capaian kinerja Divisi Keimigrasian terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 121. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25 Indeks	3,95 Indeks	121,53
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,13 Indeks	3,76 Indeks	120,12



Gambar 14. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 122. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25 Indeks	3,95 Indeks	121,53

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rata-rata hasil survei IKM pada aplikasi Survei 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM selama tahun 2023 dari seluruh Satuan Kerja yang ada di wilayah kerja Divisi Keimigrasian masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

Bulan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim
Januari	3,85	3,99
Februari	3,95	4
Maret	3,98	3,98
April	3,87	3,99
Mei	3,91	4
Juni	4	4
Juli	3,94	4
Agustus	3,93	4
September	3,93	4
Oktober	3,93	4
November	3,93	4
Desember	3,97	4
RATA-RATA	3,92	3,99

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, dapat dihitung rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

$$\text{IKM layanan keimigrasian} = \frac{\text{Rata-rata IKM Kanim Palembang} + \text{Rata-rata IKM Kanim Muara Enim}}{2}$$

$$\text{IKM layanan keimigrasian} = \frac{3,92 + 3,99}{2} = 3,95$$

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 124. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15	3,89	123,49	3,20	3,97	124,06	3,25	3,95	121,53

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah sebagaimana pada tabel di atas, terdapat kenaikan nilai indeks antara tahun 2021 dan 2022. Adapun nilai yang telah diperoleh sampai dengan Tahun 2023, terdapat sedikit penurunan yang tidak terlalu signifikan, yakni diperoleh nilai 3,95 indeks.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 125. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25	3,25	3,95	121,53

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah telah terlampaui, dengan capaian sebesar 121,53%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan

- a) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kalender kerja;
- b) Pelayanan penerbitan paspor melalui aplikasi M-Paspor dan APAPO 2.0;
- c) Pemeriksaan keimigrasian di TPI Laut berjalan dengan baik;
- d) Pelayanan penerbitan izin tinggal keimigrasian melalui aplikasi SIMKIM V2 berjalan lancar;
- e) Membentuk TIM PORA tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- f) Pengawasan orang asing di seluruh penginapan dan perhotelan di wilayah Sumatera Selatan melalui pemantauan aplikasi APOA;
- g) Operasi pengawasasn keimigrasian secara mandiri dan gabungan dengan anggota TIM PORA.

Meskipun capaian indikator kinerja telah tercapai dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, di antaranya:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia pegawai pada UKK Ogan Komering Ulu dan UKK Lubuklinggau;
- b) Belum maksimalnya pelaporan keberadaan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing (APOA) oleh pihak hotel dan penginapan yang berada di wilayah Sumatera Selatan;
- c) Data dari UPT Keimigrasian Sumatera Selatan tidak dapat diperoleh melalui sistem keimigrasian yang ada sehingga Divisi Keimigrasian harus meminta data kepada UPT Keimigrasian secara manual.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan survei yang dilakukan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 diperoleh nilai 3,95. Artinya kualitas layanan publik kepada masyarakat sangat baik, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja UPT Keimigrasian di Wilayah Kerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pencapaian hasil survei tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik yang dilakukan, di antaranya yaitu Layanan Paspor, Pengembangan SIMKIM, Kebijakan Bebas Visa bagi 169 (seratus enam puluh sembilan) negara, Penerapan e-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Layanan Eazy Passport, Layanan Si MAMAT di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim dan Penerapan Visa online, serta fasilitas imigrasi di wilayah perbatasan.

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 126. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,13 Indeks	3,76 Indeks	120,12

Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah diperoleh dari hasil rata-rata Indeks Pengamanan Keimigrasian dari seluruh satuan kerja imigrasi di wilayah kerja masing-masing. Pengukuran nilai indeks tersebut dilakukan dengan metode survey secara terpadu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan pihak eksternal yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) melalui e- Form Ditjenim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober s.d. 27 Oktober 2023. Pengisian survey dilakukan oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Pejabat Struktural/Fungsional, staf, dan pihak eksternal. Adapun rincian nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagaimana pada Surat Sekretaris Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PW.01.02-012 Tanggal 23 November 2023 Hal Hasil Pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 127. Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023

Satuan Kerja	IPK Internal		IPK Eksternal		Nilai IPK	
	Jumlah Responden	Indeks	Jumlah Responden	Indeks	Total Responden	Indeks
IPK Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan	22	3,85	18	3,64	40	3,76
Divisi Keimigrasian	5	3,7	6	3,39	11	3,53
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	12	3,87	5	3,76	17	3,84
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	5	3,95	7	3,77	12	3,85

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 128. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,11	3,89	125,08	3,12	3,89	124,67	3,13	3,76	120,12

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi indeks pengamanan keimigrasian di wilayah sebagaimana pada tabel di atas, terdapat kenaikan target dan penurunan capaian. Meski demikian, capaian tahun 2021 sampai dengan 2023 telah melampaui target.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 129. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,13	3,13	3,76	120,12

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan indeks pengamanan keimigrasian di wilayah telah terlampaui, dengan capaian sebesar 120,12%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- Penyebab keberhasilan

- Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di seluruh wilayah;
- Terjalinnnya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
- Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;

- d) Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di tingkat provinsi baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;
- e) Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Namun dibanding dengan Tahun 2022 dimana nilai Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian sebesar 3,89 pada Tahun 2023 capaian IPK sebesar 3,76 atau turun sebesar 0.13 hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya pengembangan instrumen survei yang dilakukan yaitu antara lain cakupan responden pada survei Indeks Pengamanan Keimigrasian diperluas. Survei IPK untuk divisi keimigrasian dan Kantor Imigrasi melibatkan responden pihak eksternal yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Dari hasil pelaksanaan survei jumlah responden tidak mengalami peningkatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Diantara banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pengamanan keimigrasian, 2 program berikut dianggap menjadi faktor penunjang yang paling signifikan yaitu:

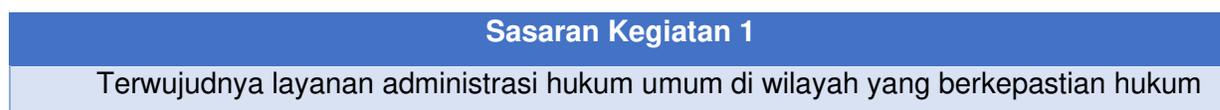
- Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Adapun fungsi TIMPORA sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing antara lain sebagai-berikut:
 - a) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
 - b) Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dan tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
 - c) Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing serta membuat peta pengawasan orang asing;
 - d) Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - e) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan Orang Asing;
 - f) Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota TIM PORA; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua TIM PORA berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.
- Cekal Online Penerapan
Aplikasi Cekal Online didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan. Pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Aplikasi cegah dan tangkal (Cekal) dengan sistem online merupakan terobosan baru di Tahun 2022 yang

dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pengecekan yang dibuat secara online. Aplikasi Cekal Online terintegrasi dengan *platform* layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Teknologi *Elastic Search*, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan yang bersangkutan. Selain itu terdapat teknologi *Matching by Biometric* guna meminimalisasi pemalsuan data. Dengan adanya Aplikasi Cekal Online, petugas di satuan kerja tidak perlu lagi melayangkan surat ke Direktorat Wasdakim guna mengajukan permohonan cegah/tangkal. Petugas yang ditunjuk disiapkan profil masing-masing agar dapat menginput data ke Aplikasi Cekal Online, begitu pula petugas verifikator.

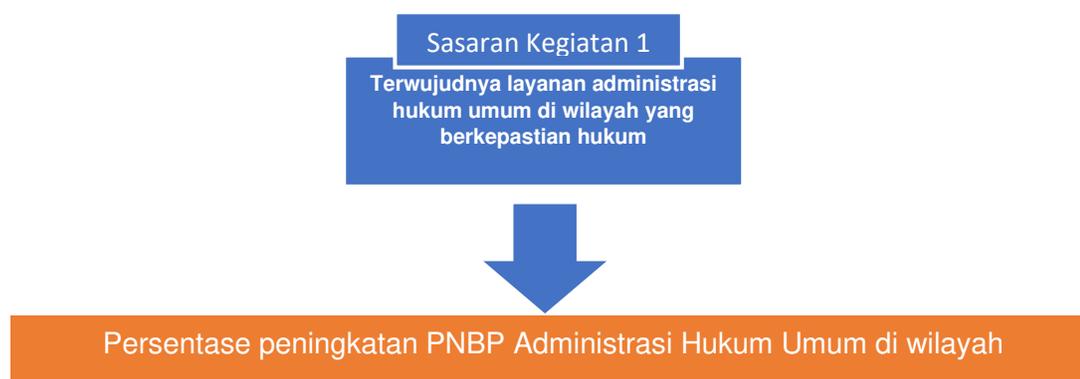
- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kantor Wilayah Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 130. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-18,12%	-3,62
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	100%	116



Gambar 15. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 131. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-18,12%	-3,62

Untuk menghitung capaian indikator ini, perlu diketahui jumlah PNBP untuk layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Sumatera Selatan pada tahun lalu dan tahun berjalan. Adapun total PNBP Tahun 2022 adalah sebesar Rp 15.225.450.000 sedangkan total PNBP Tahun 2023 adalah Rp 12.466.600.000.

Tabel 132. Perhitungan Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100% $\frac{Rp\ 12.466.600.000 - Rp\ 15.225.450.000}{Rp\ 15.225.450.000} \times 100\% = -18,12\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{-18,12\%}{5\%} \times 100\% = -3,62\%$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 133. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	-	-	-	5%	5%	100	5%	0,39%	-7,8	5%	-18,12%	-3,62

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut di atas, PNBP Administrasi Hukum Umum mengalami penurunan setiap tahunnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 134. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	-18, 12%	-3,62

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab kegagalan

Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam memenuhi target Perjanjian Kinerja pada tahun 2023, yakni penurunan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan disebabkan pasca penyakit pandemic Covid-19 yang menyebar pada wilayah ini yang menjadi faktor utama aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi menjadi lambat sehingga berdampak pula pada pengguna jasa notaris di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan senantiasa berupaya meningkatkan PNBPA AHU dengan cara menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan edukasi layanan jasa hukum serta memberikan informasi secara luas kepada masyarakat melalui radio daerah dan ikut serta dalam rangkaian kegiatan daerah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan juga menyediakan pendampingan secara langsung bagi masyarakat dalam pengajuan permohonan layanan jasa AHU yang berada pada bagian Layanan Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

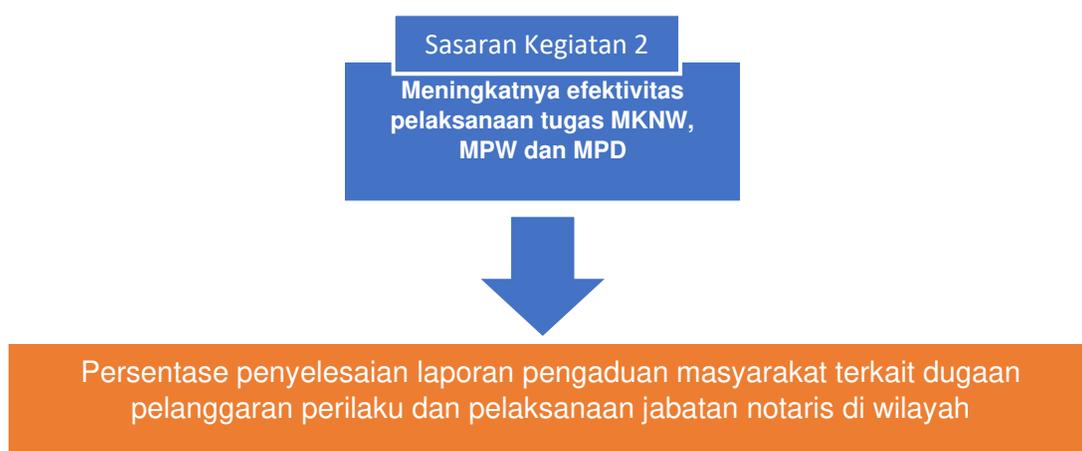
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, pimpinan senantiasa menginformasikan dan mengingatkan kepada pegawai khususnya pada layanan hukum untuk tetap menjaga sikap Professional, Akuntabel, Sinergitas, Transparan, dan Inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai, rapat evaluasi setiap akhir bulan, maupun media *WhatsApp Group* Kantor Wilayah.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

Gambar 16. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 135. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	100%	116

Tabel 136. Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, dikali 100% $\frac{69 \text{ laporan diselesaikan}}{69 \text{ laporan diterima}} \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{86\%} \times 100\% = 116\%$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah mencapai

100%. Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Desember 2023, telah masuk sebanyak 69 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah dan semuanya telah diselesaikan/ditangani.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 137. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	-	-	-	82 %	82 %	100	84 %	100 %	119	86 %	100 %	116

Sebagaimana pada tabel di atas, tidak terdapat indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat kenaikan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang dicapai telah memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 138. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	86%	100%	116

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah tidak memiliki

perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target tersebut dikarenakan peran aktif seluruh anggota Majelis dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan didukung dengan sekretariat majelis yang bertindak sigap.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah didukung oleh tindaklanjut terhadap seluruh laporan masyarakat yang masuk baik melalui MPDN, dan MPWN, serta MKNW secara efektif dan efisien sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan tepat waktu.

- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KI (Kekayaan Intelektual) Kantor Wilayah

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

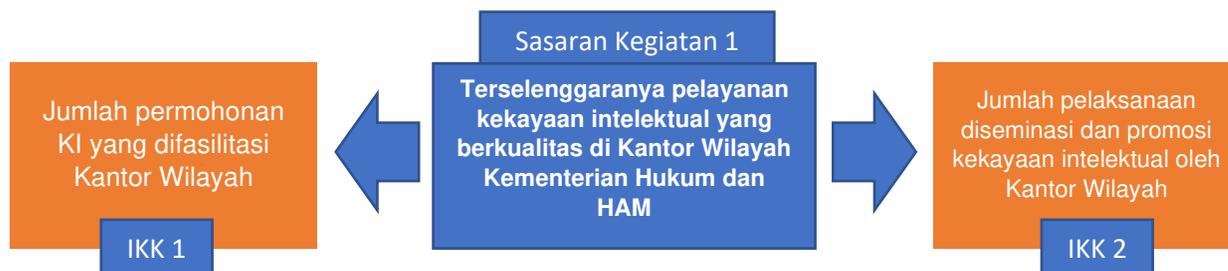
Tabel 139. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	33 layanan	75 layanan	227,28
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	5 lokus	500
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	2 lokus	100
		Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan	2 laporan	100

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Gambar 17. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 140. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	33 layanan	75 layanan	227,28

Untuk indikator ini memiliki target yaitu 33 layanan yang harus dicapai selama periode 1 tahun. Adapun dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Desember 2023, permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah adalah sebanyak 75 layanan. Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan tata cara pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual kepada setiap pemohon untuk dapat mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual secara mandiri.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 141. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	25	52	208	26	26	100	27	110	407	33	75	227,28

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Kementerian Hukum dan HAM													

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi capaian pada indikator jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah. Adapun pada Tahun 2023, terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat kenaikan target.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 142. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	5081 layanan seluruh Indonesia	33 layanan	75 layanan	227,28

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan selalu memberikan pendampingan baik konsultasi maupun pendaftaran yang ditindaklanjuti oleh pegawai yang meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal. Terkait konsultasi, pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mendengarkan terkait konsultasi dari pemohon lalu memberikan penjelasan mengenai pengertian, persyaratan, dan jumlah PNPB.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Dalam rangka mengoptimalkan layanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, pimpinan senantiasa menginformasikan dan mengingatkan kepada pegawai khususnya pada layanan hukum untuk tetap menjaga sikap Profesional, Akuntabel, Sinegritas, Transparan, dan Inovatif dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Umum. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai, rapat evaluasi setiap akhir bulan maupun media *WhatsApp Group* Kantor Wilayah.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 143. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	5 lokus	500

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah menyelenggarakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual pada 5 lokus.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 144. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	30 stake holder	30 stake holder	100	1	1	100	1	7	700	1	5	500

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terdapat perbedaan satuan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun capaian pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Meski demikian, realisasi kinerja yang dicapai telah memenuhi target yang ditentukan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 145. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	1 lokus	5 lokus	500

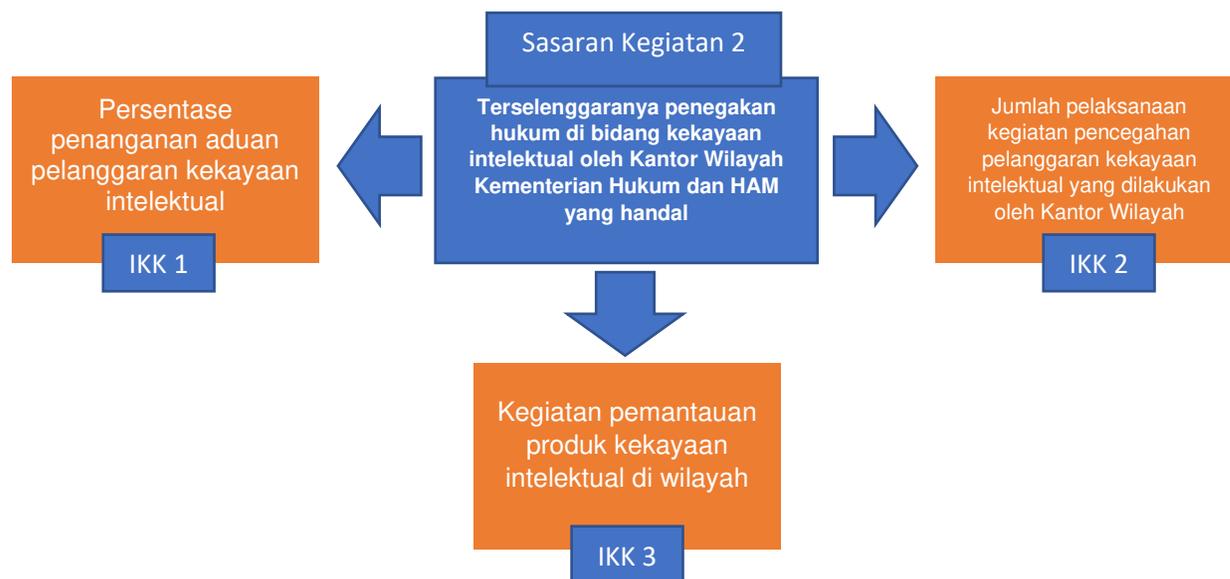
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah telah melampaui target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah sebanyak 5 (lima) lokus, di antaranya:
 - Telah diselenggarakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya, dengan tema:" Melalui Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya Kita Tingkatkan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dan Perekonomian Daerah", yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d 24 Februari 2023, bertempat di Hotel ALTS Palembang dengan jumlah peserta 100 orang dari unsur UMK, Universitas Kota Palembang, tenaga pendidik dan pengajar, serta Pemerintah Provinsi;
 - Pelaksanaan tanggal 24 Mei 2023 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang dengan jumlah peserta 100 orang dari unsur UMK;
 - Pelaksanaan tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang dengan jumlah peserta 100 orang dari unsur akademisi Sekolah Tinggi Palembang;
 - Pelaksanaan tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Hotel Aryaduta Palembang dengan jumlah peserta 100 orang dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Sumatera Selatan;
 - Pelaksanaan tanggal 4 Agustus 2023 bertempat di Hotel Emilia Palembang dengan jumlah peserta 50 orang dari UMKM binaan Dinas Perindustrian Kota Palembang.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berupa upaya untuk menginformasikan, mempengaruhi, menyebarluaskan, menawarkan dan mengajak khalayak terkait kekayaan intelektual. Sehingga, diseminasi dan promosi kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai suatu proses penyebaran informasi mengenai kekayaan intelektual dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki dan mendorong masyarakat agar dapat mencatatkan atau mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki.

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal

Gambar 18. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 146. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 147. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	-	-	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah stabil yaitu 100%.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 148. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100%	100

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual telah tercapai 100%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual dikarenakan tidak adanya laporan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan selalu menindaklanjuti setiap laporan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi dampak yang dapat merugikan pemegang Kekayaan Intelektual.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 149. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	2 lokus	100

Telah dilaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui sosialisasi PP Nomor 56 Tahun 2021 di Kota Lubuklinggau pada tanggal 27-29 Maret 2023 serta sosialisasi dan diseminasi pencegahan pelanggaran KI pada tanggal 26 Juli 2023.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 150. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2	5	250	1	1	100	2	2	100	2	2	100

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi capaian kinerja indikator jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 151. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	99 lokus (nasional)	2 lokus	2 lokus	100

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan

Tercapainya indikator jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah sebanyak 2 lokus adalah dikarenakan terselenggaranya kegiatan sebagai berikut.

- Melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Resot Kota Pagaram untuk meningkatkan edukasi masyarakat terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual pada Bulan September 2023;
- Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha serta masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi pada daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Bulan November 2023.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual, sosialisasi terkait PP Nomor 56 Tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang berbeda-beda agar penerima manfaatnya menjadi lebih luas.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.3: Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 152. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan	2 laporan	100

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 153. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	-	-	-	2	2	100	2	2	100	2	2	100

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 154. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	56 laporan (nasional)	2 laporan	2 laporan	100

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan

Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 25-27 Januari 2023 telah dilaksanakan pemantauan produk Kekayaan Intelektual kain gambo Muba pada Kabupaten Musi Banyuasin;
- Pada tanggal 1-3 Februari telah dilaksanakan pemantauan produk Kekayaan Intelektual Kopi Robusta Pagaram pada Kota Pagaram.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka menunjang keberhasilan indikator kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempetakan wilayah dan menyajikan sebuah data produk kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal PP (Peraturan Perundang-Undangan) Kantor Wilayah Capaian kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 155. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga	23 orang	21 orang	91,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		perancang peraturan perundang-undangan			

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Gambar 19. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 156. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125

Target yang harus dicapai untuk indikator ini dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah 80%. Sedangkan realisasi yang diperoleh adalah 100% yaitu dihitung berdasarkan dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Persentase fasilitasi Perda} = \frac{\text{Jumlah Perda yang selesai diharmonisasi}}{\text{Jumlah permintaan harmonisasi Perda}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase fasilitasi Perda} = \frac{251}{251} \times 100\% = 100\%$$

Adapun rekapitulasi jumlah Perda yang telah dilaksanakan harmonisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 157. Rekapitulasi Fasilitas Harmonisasi Raperda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023

NO.	DAERAH	JUMLAH RANPERDA/RANPERKADA						TOTAL
		RAPERDA PROV (DPRD)	RAPERDA PROV (PEM PROV)	RAPERDA KAB/KOTA (DPRD)	RAPERDA KAB/KOTA (PEM KAB/ KOTA)	RAPERKADA PROVINSI	RAPERKADA KAB/KOTA	
1	Provinsi Sumatera Selatan		4			22		26
2	Kota Palembang				6		21	27
3	Kab. Muara Enim			1	3		12	16
4	Kab. OKI				3		20	23
5	Kab. OKU Selatan			1	6		37	44
6	Kab. Musi Rawas						38	38
7	Kab. Musi Banyuasin			1	4		2	7
8	Kota Lubuk Linggau			7	1		18	26
9	Kab. Ogan Ilir			1	1		16	18
10	Kab. Empat Lawang				1		1	2
11	Kota Pagar Alam				1		6	7
12	Kab. OKU Timur				1		3	4
13	Kab. PALI				5		1	6
14	Kab. Banyuasin							-
15	Kab. OKU							-
16	Kota Prabumulih						3	3
17	Kab. Lahat						2	2
18	Kab. Muratara						2	2
Sub Total			4	11	32	22	182	251
TOTAL					251			

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 158. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	80%	100	80%	80%	100	80%	80%	100	80%	100%	125

Sebagaimana pada tabel di atas, capaian indikator kinerja persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham stabil dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 159. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	80%	100%	125

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham telah melampaui target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
5. Penyebab keberhasilan
 - Adanya dukungan anggaran dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah;
 - Adanya koordinasi yang intensif dan bersinergis dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota;
 - Memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Gambar 20. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 160. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	23 org	21 org	91,30

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dengan target 23 orang dan telah terealisasi dengan jumlah 21 orang perancang peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, telah tercapai sebesar 91,30%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 161. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	23	23	100	36%	36%	100	23	23	100	23	21	91,30

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, capaian kinerja untuk indikator jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung stabil yaitu 100%. Adapun capaian sampai dengan 2023 mengalami sedikit penurunan yaitu 91,30%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 162. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	618	23	21	91,30

Terdapat perbedaan antara target Rencana Strategis dengan target Perjanjian Kinerja. Adapun target peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada renstra yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan sangat tinggi dikarenakan angka tersebut merupakan nilai kumulatif dari setiap Kantor Wilayah.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional hanya dilakukan pada level unit pusat.

5. Penyebab keberhasilan/Kegagalan

Selama periode Tahun 2023, telah tercapai sebesar 91,30%. Capaian kinerja untuk indikator ini belum memenuhi target dikarenakan terdapat 1 (satu) orang perancang yang menjabat jabatan structural pada Subbidang Pemajuan HAM sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai perancang peraturan perundang-undangan, dan 1 (satu) orang perancang meninggal dunia. Dengan demikian, semua perancang yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berjumlah 21 orang dan telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Telah dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 21 Maret 2023 di Hotel Aston yang diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan Kegiatan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah untuk tahun anggaran 2023 pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023.

- Capaian Kinerja BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kantor Wilayah

Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 163. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	90,13%	109,91
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	93,13%	116,41
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	78,04	101,69
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	142,85
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1	
Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	

Gambar 21. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 164. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100

Selama Tahun 2023, telah terlaksana 2 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dari target sebanyak 2 kegiatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 165. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	-	-	-	2 keg	2 keg	100	2 keg	2 keg	100	2 keg	2 keg	100

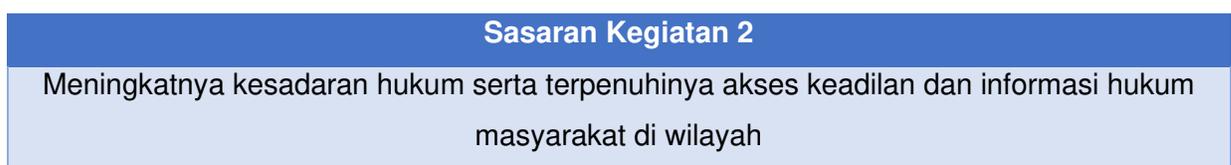
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 166. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

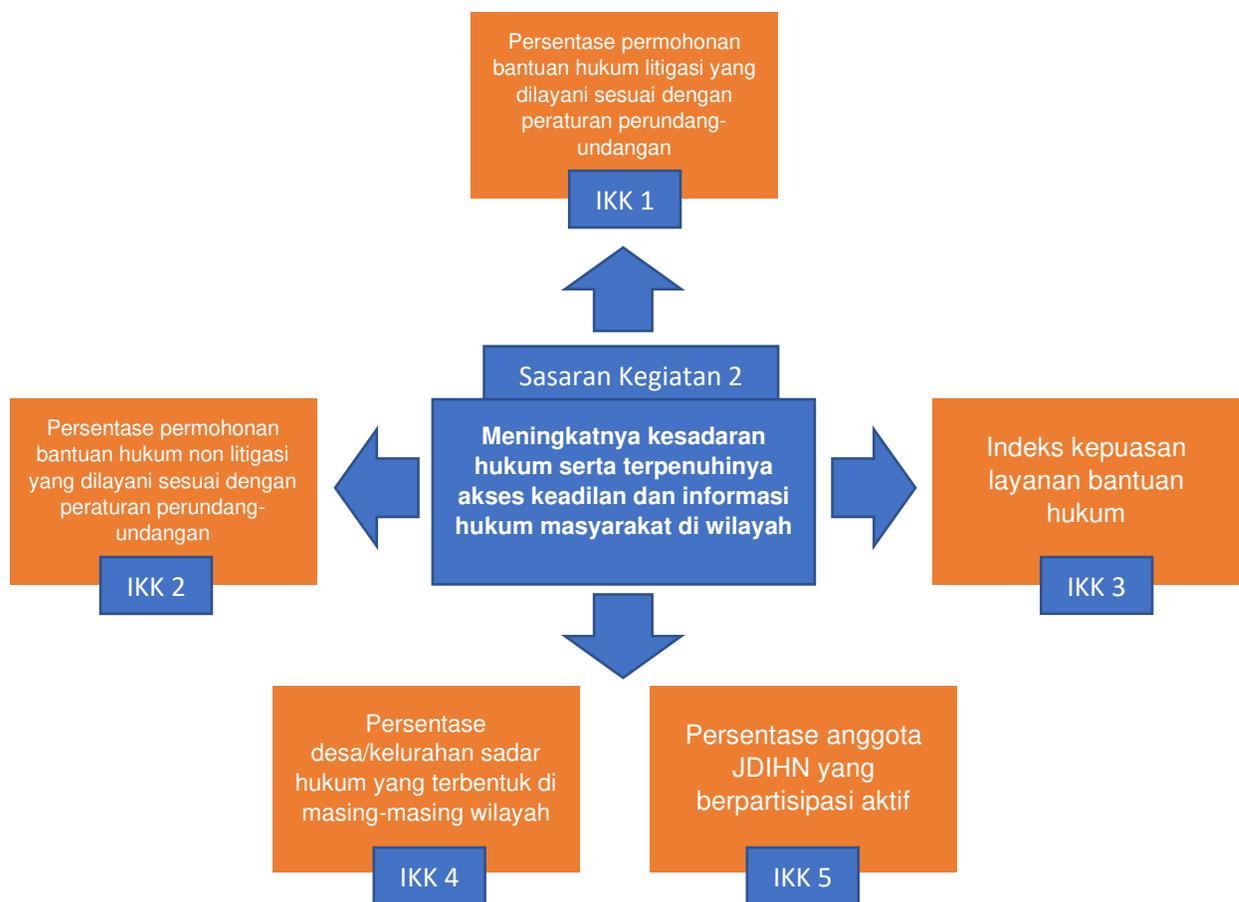
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100

Indikator kinerja jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah memiliki target yang sama, baik pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Akan tetapi, pada periode Tahun 2023 ini telah terlaksana 2 kegiatan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Terlaksananya kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah sebanyak 2 kegiatan dikarenakan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergis dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten /Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Gambar 22. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 167. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	90,13%	109,91

Perhitungan persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membagi indikator jumlah permohonan yang diterima dengan jumlah permohonan bantuan hukum, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 168. Perhitungan Bantuan Hukum Litigasi

Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah Permohonan Bantuan Hukum	Jumlah Permohonan yang diterima	Persentase
	365	329	90,13%

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 169. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	77 %	283, 46%	368, 12	81 %	100 %	123, 45	82%	90,1 3%	109, 91

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 170. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	82%	90,13%	109,91

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, indikator kinerja persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target yaitu tercapai sebesar 90,13% dari target 82%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah mencapai target dikarenakan aktifnya Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi, dan lengkapnya dokumen data dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum litigasi yang diunggah pada aplikasi Sidbankum sehingga permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang diajukan dapat diterima oleh verifikator.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah telah dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 171. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan	80%	93,13%	116,41

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	masyarakat di wilayah	perundang-undangan			

Perhitungan persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membagi indikator jumlah permohonan yang diterima dengan jumlah permohonan bantuan hukum, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 172. Perhitungan Bantuan Hukum Non Litigasi

Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah Permohonan Bantuan Hukum	Jumlah Permohonan yang diterima	Persentase
	102	95	93,13%

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 173. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	79 %	361, 11%	457, 10	80%	100 %	125	80%	93, 13%	116, 41

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terjadi fluktuasi capaian pada indikator kinerja persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 174. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%	93,13%	116,41

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase permohonan bantuan

hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah melampaui target, yaitu tercapai sebesar 93,13% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah mencapai target dikarenakan aktifnya Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum Non Litigasi, dan lengkapnya dokumen data dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum non litigasi yang diunggah pada aplikasi Sidbankum sehingga permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diajukan dapat diterima oleh verifikator.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Tercapainya indikator persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditunjang oleh beberapa hal yakni telah dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.3: Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 175. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75	78,04	101,69

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum didapat melalui kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah melalui metode kuesioner yang kemudian hasil monitoring tersebut diinput ke dalam aplikasi SIDBankum. Pada periode Tahun 2023, telah dilaksanakan monitoring dengan sampel sebanyak 52 orang dari penerima bantuan hukum, dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 176. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023

NO	NAMA PEMBERI BANTUAN HUKUM	NAMA PENERIMA	NILAI
1	KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA	ANGGUN PERMATA SARI	95,45
2	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN SUMSEL	ABU NAIM	52

NO	NAMA PEMBERI BANTUAN HUKUM	NAMA PENERIMA	NILAI
3	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN SUMSEL	SUHADI	100
4	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN SUMSEL	M. RIDHO PRATAMA	93,45
5	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN SUMSEL	INDAH SUMANDARI ALIAS AMOY BINTI ROSADI	73,82
6	PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI PALEMBANG	JULIANTIKA	73,82
7	PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI PALEMBANG	ZAINI	41,82
8	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBH SUMSEL)	WANCIK BIN MATCIK	44
9	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBH SUMSEL)	KOSMAN BIN RAJAB	36,73
10	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA	RIKA DHARMAYANTI BINTI DARSONO (ALM)	81,09
11	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA	NATALIA BINTI EDY ARIYANSYAH	70,91
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA	EMI YANTI BINTI HASAN BASRI (ALM)	72,36
13	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (ALM)	100
14	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	AGUS SANI BIN HARUN	67,82
15	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	M. DIKA BIN MANGKU ALAM	46,18
16	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	PAREL APRIANSYAH BIN ALPIYAN	62,91
17	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	HERNADI BIN MELWANI	27,27
18	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK SUMATERA SELATAN	SRI LESTARI BINTI SARWONO	99,27
19	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG	NILA APRELIASARI BINTI SAHLI	99,27
20	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG	ROHANA BINTI SUWITO	98,55
21	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG	MELLYANI	100
22	KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAN PEMUDA	CITRA SITA PRASNA DEVI	100
23	KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAN PEMUDA	LEYZA TRIZA DONA	99,27
24	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK SUMATERA SELATAN	AGUSTINA BINTI AHMAT JAMHURI	95,45
25	LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM	RINDI IRAWAN BIN DIDI IRAWAN DAN WAHYUDI BIN RIKO (ALM)	70,18
26	LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM	PIKO APRIZAL HIDAYAT BIN INDRA GANDI	97,82

NO	NAMA PEMBERI BANTUAN HUKUM	NAMA PENERIMA	NILAI
27	LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM	POLI AGUSTAN BIN EDY	68,73
28	LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM	ASMO'I BIN SAHARI	100
29	LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM	YOGA JULIANSA BIN WISTA AWAN	74,36
30	LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM	RIKI SANTOSO BIN PARDI	84,55
31	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	FIBRI MARITA BIN AMIRUDIN	66,55
32	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	LEONARDO BIN BERIN	95,45
33	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	ANGGA SAPUTRA BIN ROHMANTONO	100
34	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	NOVENDI AB BIN AHMAD BASUNI	66,55
35	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	DONI BIN LAMZA	100
36	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	HERU DJULIANSYAH BIN HERMANSYAH	44
37	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	AGUS SALIM BIN H. ALI MUHTAR	80,36
38	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	ALAMIN SUHRI BIN DEKI KARTONO	97,82
39	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	DIMAS PRAYOGA KUSUMA BIN HERRY KUSUMA	94,91
40	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	OKTA ARIANSYA BIN ENDANG SAFRI	86,18
41	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	ANDI MAULANA BIN MARWAN	94
42	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	HENDRI BUDIANTO BIN H. HASYIM (ALM)	100
43	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	ANDI SAPUTRA BIN HERMAN	86,91
44	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	RICO ABDUL ROJAK BIN KODRAT	75,27
45	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	HERU AFRIANSYAH, S.PD BIN TIBRONI	55,45
46	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MUSI BANYUASIN	MUSTARI BIN MUZAKIR	73
47	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MUSI BANYUASIN	JUNAIDI MZ	73
48	LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM SERASAN MUARA ENIM	RISWANSYAH BIN HERIANSYAH	68
49	LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM SERASAN MUARA ENIM	DONI ANGGARA BIN H. SAMSURIN	61
50	LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM SERASAN MUARA ENIM	WINCE BIN MUSTAR	72
51	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT	ENDAH RAHMAWATI BINTI SERAN	63
52	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT	AHMAD FAUZAN	78
RATA-RATA			78,05

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
- Tabel 177. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	-	-	-	76,61	70,16	91,58	76,6	67	122,53	76,75	78,04	101,69

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, terjadi fluktuasi capaian kinerja indikator indeks kepuasan layanan bantuan hukum.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 178. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,75	78,04	101,69

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja indeks kepuasan layanan bantuan hukum tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja indeks kepuasan layanan bantuan hukum dikarenakan penerima bantuan hukum telah merasa puas terhadap pelayanan bantuan hukum dan telah terlayani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Organisasi Bantuan Hukum. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Telah dilaksanakan pendampingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, OKU, Kota Pagaralam, dan Kota Palembang.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.4: Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 179. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	142,85

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dihitung dengan cara membagi desa sadar hukum yang lolos verifikasi dengan usulan kelompok sadar hukum yang telah dibentuk, dengan rincian sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah DSH lolos verifikasi}}{\text{jumlah usulan kelompok kadarkum}} \times 100\%$$

$$\frac{74}{74} \times 100\% = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 180. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	-	-	-	-	-	-	70 %	70 %	100	70 %	100 %	142,85

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 181. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%	142,85

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah belum mencapai target yang ditentukan. Selama periode Tahun 2023, telah tercapai sebesar 100% dari target 70%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah didukung oleh tersedianya SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Daerah dan terpenuhinya syarat penetapan Usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan hasil nilai kuesioner yang telah diterima oleh Kantor Wilayah.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Capaian indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah didukung dengan telah dilakukannya pembinaan, pemantauan dan evaluasi desa sadar hukum di Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Pagaralam.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.5: Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 182. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500

Anggota JDIHN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) instansi termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Sebanyak 36 (tiga puluh enam) anggota tersebut telah terintegrasi dengan JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2021.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 183. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	-	-	-	20%	100%	500	20%	100%	500	20%	100%	500

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 184. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	100%	500

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif telah melampaui target yaitu tercapai 100% dari target 20%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target pada indikator kinerja ini adalah karena seluruh anggota JDIHN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh enam) instansi telah terintegrasi dan berpartisipasi aktif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif telah terintegrasi 100% dengan BPHN didukung dengan kegiatan penyebaran JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ke masyarakat umum dengan memanfaatkan media sosial (youtube, instagram, twitter dan facebook).

- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM Kantor Wilayah

Capaian kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 185. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	425
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	3 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	566
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti	1 instansi pemerintah	28 instansi	2800

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	9 rekomendasi	300

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Gambar 23. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 186. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	425

Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota serta besarnya animo para Kepala Daerah untuk melaksanakan program aksi HAM, hal ini menyebabkan

besarnya presentase capaian aksi HAM Tahun 2023, yakni sebanyak 17 instansi telah melaksanakan program aksi HAM.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 187. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	6	17	283,3	2	17	850	2	17	850	4	17	425

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada target indikator jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM. Adapun realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2020-2023 stabil yaitu 17 instansi pemerintah.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra
Tabel 188. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4	4	17	425

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebanyak 17 instansi pemerintah dari target 4 instansi pemerintah.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan
Target pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM sedikit sedangkan wilayah kerja Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan luas dan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Hal ini yang menyebabkan besarnya nilai capaian kinerja untuk indikator ini.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Keberhasilan indikator kinerja kegiatan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM tak lepas dari kemampuan petugas di bidang HAM memberikan pemahaman kepada para Kepala Daerah dan Kepala OPD serta melakukan pendampingan kepada para operator dalam pemenuhan data dukung Kuesioner 120 Variabel.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Jumlah kabupaten/kota peduli HAM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 189. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	3 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	566

Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota serta besarnya animo para Kepala Daerah untuk meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM, hal ini menyebabkan besarnya presentase capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 190. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	17	17	100	2	17	100	2	3	150	3	17	566

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada target indikator jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Adapun realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2020-2023 stabil yaitu 17 instansi pemerintah.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 191. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	3 instansi pemerintah	3 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	566

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
	program aksi HAM					

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebanyak 17 instansi pemerintah dari target 3 instansi pemerintah.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya target indikator kinerja ini adalah karena besarnya animo para Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadikan daerahnya berpredikat Peduli HAM.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Indikator kinerja kegiatan jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM berhasil didukung oleh adanya kerjasama/sinergi yang baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia di daerah serta tumbuhnya kesadaran dari penyelenggara pemerintah daerah perihal pentingnya menghadirkan pembangunan yang berspektif HAM.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.3: Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 192. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah	28 instansi pemerintah	2800

Tindak lanjut hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM telah dilaksanakan pada 28 instansi, yang terdiri dari 27 Unit Pelaksana Teknis dan 1 Kantor Wilayah.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 193. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	1	100	2	28	1400	2	28	1400	1	28	2800

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada target indikator jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM. Adapun realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2021-2023 cenderung stabil yaitu 28 instansi pemerintah.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 194. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah	1 instansi pemerintah	28 instansi pemerintah	2800

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebanyak 28 instansi pemerintah dari target 1 instansi pemerintah.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

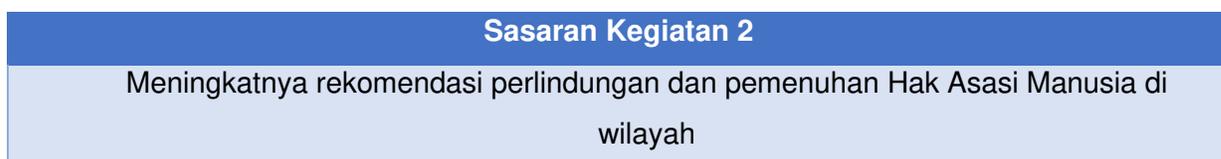
Indikator kinerja jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

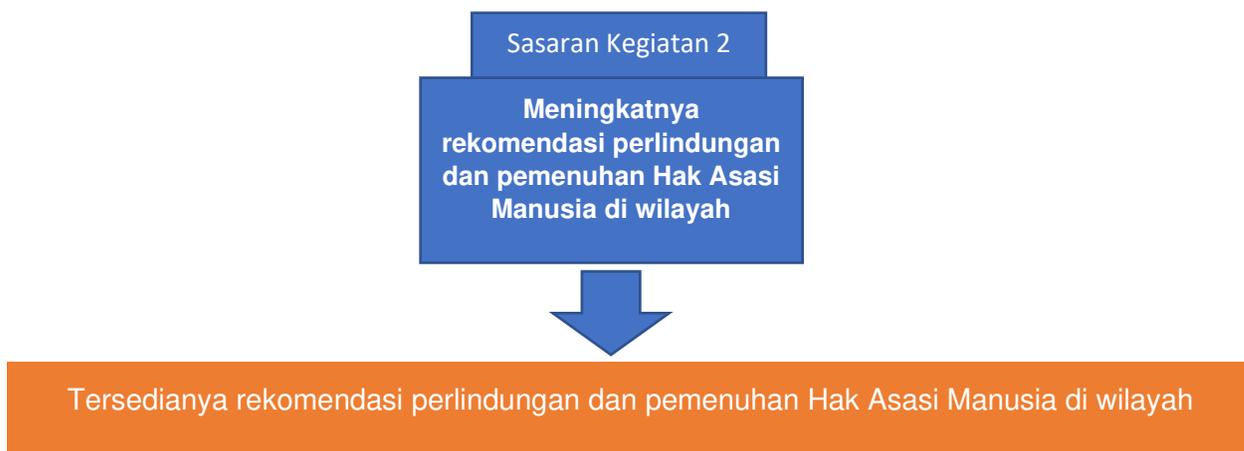
Tercapainya indikator kinerja kegiatan jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM adalah karena adanya kesadaran akan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang ramah HAM dan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Salah satu yang menjadi faktor pendukung keberhasilan diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM adalah dikarenakan setiap UPT yang akan mendapat predikat WBK diharuskan untuk memenuhi standar pelayanan yang baik bagi masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan.



Gambar 24. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 196. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	9 rekomendasi	300

Selama periode Tahun 2023, telah tercapai 9 rekomendasi yakni melalui:

- ❖ Koordinasi dan klarifikasi ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Muhamad Normansyah yang mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Gubernur untuk pengurusan dokumen kepemilikan tanah/lahan di daerah Jakabaring Palembang;

- ❖ Koordinasi dan klarifikasi ke Kantor Hukum MNS & Rekans selaku kuasa dari pelapor Muhammad Kosasi yang melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak terlapor atas nama Solihin Hasibuan perihal penggelapan dokumen milik Yayasan Izzatuna Palembang;
- ❖ Koordinasi dan klarifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka menindaklanjuti surat rekomendasi Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM perihal pencemaran lingkungan sungai akibat *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin;
- ❖ Koordinasi dan klarifikasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perihal sengketa lahan di Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;
- ❖ Koordinasi dan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Lahat menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Kantor Hukum Ahhiar Afriadi, SH & Rekans perihal Laporan dugaan mal administrasi Bupati Lahat dan Kepala Desa Pagar Alam, Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perihal pemberhentian Perangkat Desa Pagar Alam;
- ❖ Koordinasi dan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Lahat menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Kantor Hukum Ahhiar Afriadi, SH & Rekans perihal Laporan dugaan Mal administrasi Bupati Lahat dan Kepala Desa Padang Pagun Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perihal pemberhentian Perangkat Desa Padang Pagun;
- ❖ Koordinasi dan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Lahat menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Kantor Hukum Ahhiar Afriadi, SH & Rekans perihal laporan dugaan Mal administrasi Bupati Lahat dan Kepala Desa Germidar Ilir Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan perihal pemberhentian Perangkat Desa Germidar Ilir;
- ❖ Rapat koordinasi dan klarifikasi dengan BPN Kota Palembang dan instansi terkait menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Kantor Hukum Mustka Yantono, SH & Rekans perihal permohonan pembatalan 55 (lima puluh lima) sertifikat atas tanah milik Zahriah Binti Subro; dan
- ❖ Rapat koordinasi dan klarifikasi dengan Bank BTN Kota Palembang dan instansi terkait menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Kantor Hukum Caisar Law Firm perihal permohonan pemblokiran 19 (sembilan belas) sertifikat atas tanah milik Sutomo.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 197. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3	5	166,67	3	3	100	3	9	300	3	9	300

Sebagaimana pada tabel di atas, terjadi fluktuasi pada capaian indikator Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah. Adapun realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2020-2023 tersebut selalu memenuhi target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 198. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	3 rekomendasi	9 rekomendasi	300

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebanyak 9 rekomendasi dari target 3 rekomendasi.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Keberhasilan indikator kinerja tersedianya rekomendasi perlindungan HAM di wilayah oleh instansi terkait sejalan dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya pemenuhan dan penegakan HAM di tengah masyarakat.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Koordinasi dan komunikasi yang baik yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada instansi terkait pemangku kepentingan terhadap permasalahan HAM yang di rekomendasikan sehingga memudahkan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada.

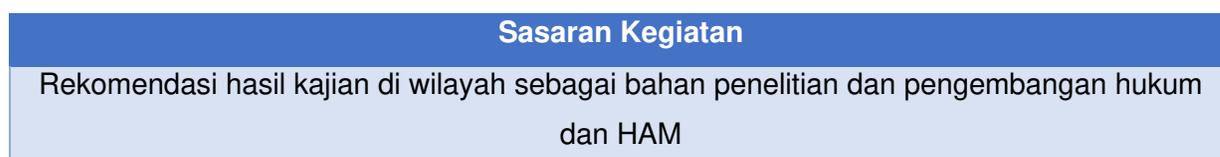
- Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

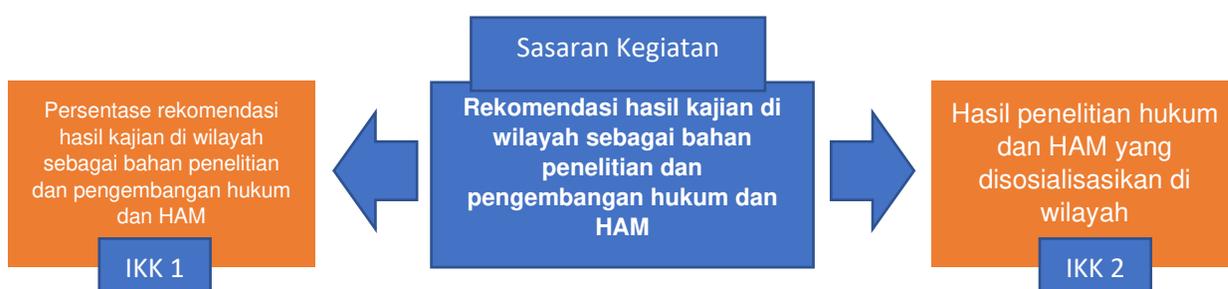
Tabel 199. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	100%	125
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.



Gambar 25. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 200. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	100%	125

Untuk indikator ini, telah terealisasi sebanyak 100%, dihitung dari target volume RKAKL yakni sebanyak 3 rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas layanan publik berbasis IPK-IKM, telah dilaksanakan 3 kali kegiatan dari target 3 kegiatan. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut:
 $3/3 \times 100\% = 100\%$

Adapun rincian 3 rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Evaluasi kebijakan terhadap Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- Rapat pengulasan dan analisa data informasi SIPKUMHAM berupa rapat dengan permasalahan yang sedang viral dan mengundang stakeholder terkait;
- Monitoring dan evaluasi survey IPK-IKM dan survey integritas. Survei IPK-IKM dan survey integritas merupakan survey dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang harus diikuti oleh seluruh Satuan Kerja pada Kementerian Hukum dan HAM dan diisi oleh minimal 30 orang pegawai

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 201. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	60%	95%	158,3	70%	90%	128,57	80%	100%	125	80%	100%	125

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 202. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	80%	100%	125

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.
 - Evaluasi kebijakan terhadap Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
 - Rapat pengulasan dan analisa data informasi SIPKUMHAM berupa rapat dengan permasalahan yang sedang viral dan mengundang stakeholder terkait;
 - Monitoring dan evaluasi survey IPK-IKM dan survey integritas. Survei IPK-IKM dan survey integritas merupakan survey dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang harus diikuti oleh seluruh Satuan Kerja pada Kementerian Hukum dan HAM dan diisi oleh minimal 30 orang pegawai.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Rekomendasi yang sudah dihasilkan yaitu terkait IPK IKM indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat, baik pada kantor wilayah maupun UPT. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antar pihak serta didukung oleh peran pimpinan dalam mendorong pelaksanaan kegiatan ini.

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 203. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100

Indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai melalui kegiatan OPINI Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan di

Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tanggal 21 Maret 2023 dengan jumlah peserta daring sebanyak 450 orang dengan judul tema Urgensi pengelolaan royalti di bidang literasi.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 204. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)									
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100									

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 205. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	1 buku	100

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Kegiatan OPINI Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan karena adanya koordinasi yang baik antara panitia, narasumber daerah, narasumber pusat serta dukungan penuh para pimpinan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kegiatan OPINI Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 ini dilaksanakan secara offline dan online, tentunya didukung oleh jaringan IT yang baik sehingga tidak terdapat kendala selama berlangsungnya acara.

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Adapun akuntabilitas keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 206. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi				
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	24.321.131.000	23.788.972.342	97,81
TOTAL		24.321.131.000	23.788.972.342	97,81
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan				
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	56.111.739.467	55.712.912.151	99,29
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	8.118.624.200	8.060.275.579	99,28
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	41.434.653.000	41.157.643.618	99,33
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	886.535.400	877.263.289	98,95
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	3.485.734.000	3.445.112.012	98,83
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1.917.433.200	1.903.981.387	99,30
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	56.111.739.467	55.712.912.151	99,29
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	56.111.739.467	55.712.912.151	99,29

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	55.842.979.800	55.444.275.885	99,29
TOTAL		280.021.178.000	278.027.288.223	99,29
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	5.510.530.000	5.469.481.247	99,26
TOTAL		5.510.530.000	5.469.481.247	99,26
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum				
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1.777.238.000	1.767.908.314	99,48
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	750.562.000	707.145.850	94,22
TOTAL		2.527.800.000	2.475.054.164	97,91
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual				
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.382.545.000	1.370.178.108	99,11
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	56.842.000	56.551.600	99,49
TOTAL		1.439.387.000	1.426.729.708	99,12
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan				
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	264.009.000	263.045.700	99,64
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	90.991.000	90.967.500	99,97
TOTAL		355.000.000	354.013.200	99,72
Badan Pembinaan Hukum Nasional				
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	135.197.000	124.384.200	92,00
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1.630.736.000	1.598.907.270	98,05
TOTAL		1.765.933.000	1.723.291.470	97,59

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
Direktorat Jenderal HAM				
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	204.980.000	204.209.018	99,62
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	11.230.000	11.299.000	99,99
TOTAL		216.210.000	214.838.018	99,64
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM				
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	214.073.000	213.663.175	99,81
TOTAL		214.073.000	213.663.175	99,81

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan maupun Unit Pelaksana Teknis berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 209. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

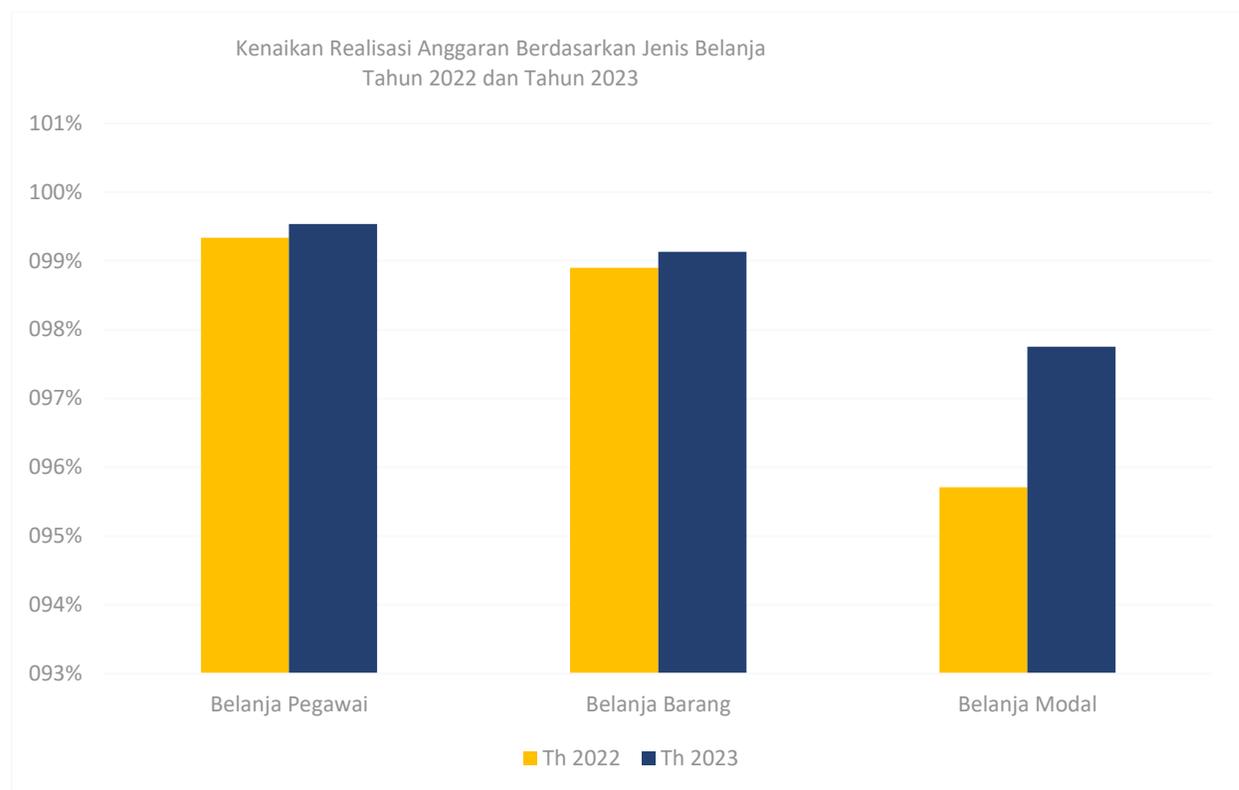
JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	123.416.573.000	122.596.784.120	819.788.880	99,34%
Belanja Barang	202.333.618.000	200.104.653.855	2.228.964.145	98,90%
Belanja Modal	9.218.993.000	8.823.647.218	395.345.782	95,71%
Total	334.969.184.000	331.525.085.193	3.444.098.807	98,97%
TAHUN 2023				
Belanja Pegawai	125.276.419.000	124.696.919.029	579.499.971	99,54%
Belanja Barang	195.556.924.000	193.862.498.305	1.694.425.695	99,13%
Belanja Modal	11.744.514.000	11.480.475.397	264.038.603	97,75%
Total	332.577.857.000	330.039.892.731	2.537.964.269	99,24%

Berdasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga, target penyerapan anggaran tahun 2023 untuk jenis belanja pegawai 95%, belanja barang 90%, belanja modal 90%, dan belanja bantuan sosial 95%. Penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan per 31 Desember 2023 mencapai target untuk semua jenis belanja, yaitu jenis belanja pegawai 99,54%, jenis belanja barang 99,13%, dan jenis belanja modal 97,75%.

Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022, pada

jenis belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja belanja modal mengalami kenaikan sebesar 2,04%.

Gambar 26. Perbandingan Realisasi Anggaran



C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan penginputan sesuai dengan timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- Semester, batas waktu pada bulan Juli;
- Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Gambar 27. SMART



Berikut merupakan rekapitulasi nilai SMART Tahun 2023:

Tabel 208. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2023

NO	SATKER	Realisasi Anggaran	Konsisten RPD Akhir	Capaian Keluaran Kegiatan	Efisiensi	Nilai
1.	Sekretariat Jenderal	57,53	97,39	93,18	20,00	92,44
2.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	50,07	82,20	100,00	20,00	91,92
3.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	69,52	97,47	100,00	20,00	96,58
4.	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	58,91	95,18	100,00	20,00	95,14
5.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	59,83	46,82	69,14	8,47	64,76
6.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan	71,90	99,17	100,00	20,00	97,12
7.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	53,21	97,93	100,00	20,00	95,08
8.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	63,93	98,56	100,00	20,00	96,24
9.	Direktorat Jenderal Imigrasi	64,75	97,05	100,00	20,00	96,04
UPT PEMASYARAKATAN						
1.	Lapas Kelas I Palembang	52,32	97,07	100,00	20,00	94,84
2.	LPKA Klas I Palembang	52,67	94,21	38,35	19,77	67,37
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	46,90	97,42	49,84	20,00	72,56
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	53,24	74,48	100,00	20,00	90,82
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	50,14	89,19	10,95	-20,00	25,86
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	54,78	98,23	81,70	14,98	83,74
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	50,89	96,58	88,04	20,00	89,41
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	50,16	97,38	80,34	20,00	86,14
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	54,11	97,85	100,00	20,00	95,16
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	51,61	97,57	93,08	20,00	91,85
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	51,60	95,44	4,62	-20,00	24,38
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	24,88	64,69	4,72	8,22	36,42
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	50,89	97,59	100,00	20,00	94,80
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	56,22	70,88	3,14	-20,00	19,72
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	50,56	83,47	8,87	2,49	40,03
16.	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	50,02	97,57	32,47	-13,89	41,10

NO	SATKER	Realisasi Anggaran	Konsisten RPD Akhir	Capaian Keluaran Kegiatan	Efisiensi	Nilai
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	16,81	58,37	1,46	-15,63	16,01
18.	Rutan Kelas I Palembang	50,88	95,28	62,68	18,39	76,99
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	50,34	97,25	100,00	20,00	94,68
20.	Rutan Kelas II Baturaja	48,09	98,00	73,23	20,00	82,96
21.	Bapas Kelas I Palembang	70,54	74,36	100,00	20,00	92,48
22.	Bapas Kelas II Lahat	68,19	80,50	7,25	-20,00	24,42
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	86,03	41,65	37,23	-20,00	32,12
24.	Bapas Kelas II Muratara	90,41	92,60	100,00	9,59	90,28
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	58,07	90,88	100,00	20,00	94,27
26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	47,74	94,80	92,59	20,00	90,76
UPT KEIMIGRASIAN						
1.	Kanim Kelas I TPI Palembang	53,17	96,59	44,01	20,00	70,48
2.	Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim	55,05	96,58	39,33	20,00	68,63

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
- g) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian output, bobot 25%.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2023:

Tabel 209. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2023

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	406457	LAPAS LUBUK LINGGAU	16.766.469.000	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	100,00	100%	100,00
2	408813	KANWIL DITJEN PAS	806.279.000	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00	80,00	80%	100,00
3	683593	LAPAS KAYU AGUNG	15.179.858.000	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	9,77	5,00	25,00	99,77	100%	99,77
4	406472	RUTAN BATURAJA	6.939.747.000	10,00	10,00	19,73	10,00	10,00	9,81	5,00	25,00	99,54	100%	99,54
5	408817	KANWIL DITJEN HAM	216.210.000	10,00	9,40	20,00	0,00	0,00	9,95	5,00	25,00	79,35	80%	99,19
6	406494	RUTAN PRABUMULIH	9.422.813.000	10,00	8,98	19,95	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,93	100%	98,93
7	406488	LAPAS MARTAPURA	8.709.317.000	10,00	9,00	20,00	10,00	10,00	9,93	5,00	25,00	98,93	100%	98,93
8	406402	LAPAS LAHAT	10.644.750.000	10,00	8,95	19,99	10,00	10,00	9,92	5,00	25,00	98,86	100%	98,86
9	652958	LAPAS NARKOTIKA MUARA BELITI	14.012.356.000	10,00	8,87	19,90	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,77	100%	98,77
10	406375	LAPAS PALEMBANG	24.590.911.000	10,00	8,85	20,00	10,00	10,00	9,85	5,00	25,00	98,70	100%	98,70
11	683589	LAPAS BANYUASIN	16.466.041.000	10,00	8,73	20,00	10,00	10,00	9,93	5,00	25,00	98,66	100%	98,66
12	406420	LAPAS MUARAENIM	17.281.590.000	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	9,89	5,00	25,00	99,89	100%	99,89

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
13	406463	LAPAS SURULANGUN RAWAS	5.339.785.000	10,00	8,95	19,88	10,00	10,00	9,74	5,00	25,00	98,57	100%	98,57
14	408820	KANWIL BSK	214.073.000	10,00	8,81	20,00	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00	78,81	80%	98,51
15	408816	KANWIL DITJEN PP	355.000.000	10,00	8,83	20,00	0,00	0,00	9,95	5,00	25,00	78,78	80%	98,48
16	408815	KANWIL DITJEN KI	1.439.387.000	10,00	8,54	20,00	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00	88,54	90%	98,38
17	408812	KANWIL DITJEN AHU	2.527.800.000	10,00	8,50	20,00	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00	88,50	90%	98,33
18	664565	KANIM MUARAENIM	7.097.323.000	10,00	8,75	20,00	9,70	10,00	9,88	5,00	25,00	98,33	100%	98,33
19	406539	LPKA PALEMBANG	9.587.166.000	10,00	8,30	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,30	100%	98,30
20	497733	LAPAS PEREMPUAN PALEMBANG	12.575.398.000	10,00	8,81	19,92	10,00	10,00	9,55	5,00	25,00	98,28	100%	98,28
21	406426	LAPAS MUARADUA	6.213.873.000	10,00	8,19	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,19	100%	98,19
22	406381	LAPAS TANJUNG RAJA	14.603.932.000	10,00	8,66	20,00	9,70	10,00	9,81	5,00	25,00	98,17	100%	98,17
23	408143	KANIM PALEMBANG	13.107.197.000	10,00	9,21	20,00	9,70	10,00	9,21	5,00	25,00	98,12	100%	98,12
24	408818	KANWIL SETJEN	24.321.131.000	10,00	9,14	20,00	9,40	10,00	9,47	5,00	25,00	98,01	100%	98,01

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM				
25	406441	LAPAS EMPAT LAWANG	5.214.821.000	10,00	7,65	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	97,65	100%	97,65
26	653271	RUPBASAN BATURAJA	1.421.587.000	10,00	8,77	19,32	0,00	0,00	9,99	5,00	25,00	78,08	80%	97,60
27	109118	RUTAN PALEMBANG	24.230.561.000	10,00	8,56	20,00	9,40	10,00	9,63	5,00	25,00	97,59	100%	97,59
28	653108	BAPAS LAHAT	3.733.357.000	10,00	8,37	20,00	9,40	10,00	9,73	5,00	25,00	97,50	100%	97,50
29	683996	LAPAS NARKOTIKA BANYUASIN	15.131.467.000	10,00	7,92	19,58	10,00	10,00	9,93	5,00	25,00	97,43	100%	97,43
30	408814	KANWIL DITJEN IM	1.512.625.000	10,00	7,89	20,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	67,89	70%	96,99
31	632009	BAPAS MUSI RAWAS UTARA	2.699.792.000	10,00	6,81	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	96,81	100%	96,81
32	406369	BAPAS PALEMBANG	8.626.156.000	10,00	6,96	20,00	10,00	10,00	9,84	5,00	25,00	96,80	100%	96,80
33	626115	RUPBASAN PALEMBANG	3.011.090.000	10,00	6,87	20,00	10,00	10,00	8,83	5,00	25,00	95,70	100%	95,70
34	408819	KANWIL BPHN	1.765.933.000	10,00	6,82	20,00	0,00	0,00	9,71	5,00	25,00	76,53	80%	95,66
35	632013	BAPAS OKU INDUK	2.369.365.000	10,00	7,64	17,90	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00	75,54	80%	94,43

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM				
36	406432	LAPAS PAGAR ALAM	10.265.180.000	10,00	6,40	17,85	9,70	10,00	9,93	5,00	25,00	93,88	100%	93,88
37	406401	LAPAS SEKAYU	14.177.517.000	10,00	9,32	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	99,32	100%	99,32
RATA - RATA NILAI IKPA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN														98,06

Capaian Kinerja Anggaran diperoleh dari dua variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi nilai capaian kinerja anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Tabel 210. Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

No	SATKER	Nilai SMART	Nilai IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
		A	B	(Ax60%) + (Bx40%)
KANTOR WILAYAH				
1.	Sekretariat Jenderal	89,14	98,01	92,688
2.	Ditjen Administrasi Hukum Umum	90,01	98,33	93,338
3.	Ditjen Kekayaan Intelektual	84,96	98,38	90,328
4.	Balitbang Hukum dan HAM	98,4	98,51	98,444
5.	BPHN	77,88	95,66	84,992
6.	Ditjen Peraturan Perundang - undangan	87,82	98,48	92,084
7.	Ditjen Hak Asasi Manusia	91,57	99,19	94,618
8.	Ditjen Pemasyarakatan	81,38	100	88,828
9.	Ditjen Imigrasi	91,42	96,99	93,648
UPT PEMASYARAKATAN				
1.	Lapas Kelas I Palembang	89,5	98,7	93,18
2.	LPKA Klas I Palembang	87,65	98,3	91,91
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	89,57	98,28	93,054
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	91,71	98,17	94,294
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	90,25	98,86	93,694
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	99,24	100	99,544
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	96,2	98,77	97,228
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	88,58	98,66	92,612
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	93,94	99,89	96,32
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	90	99,32	93,728
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	98,88	99,77	99,236
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	88,67	97,43	92,174
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	91,67	98,93	94,574
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	89,19	98,19	92,79
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	88,58	97,65	92,208
16.	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	99,37	98,57	99,05
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	93,66	93,88	93,748
18.	Rutan Kelas I Palembang	95,67	97,59	96,438
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	89,43	98,93	93,23
20.	Rutan Kelas II Baturaja	87,67	97,6	91,642
21.	Bapas Kelas I Palembang	97,23	96,8	97,058
22.	Bapas Kelas II Lahat	86,52	97,5	90,912
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	86,48	94,43	89,66
24.	Bapas Kelas II Muratara	85,76	96,81	90,18
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	85,76	95,7	89,736
26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	99,42	97,6	98,692

No	SATKER	Nilai SMART	Nilai IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
		A	B	(Ax60%) + (Bx40%)
UPT KEIMIGRASIAN				
1.	Kanim Kelas I TPI Palembang	80,71	98,12	87,674
2.	Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim	82,81	98,33	89,018

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun capaian kinerja yang diinput pada aplikasi e-performance tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi serta Kepala Satuan Kerja pada tahun 2023, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Subbab Capaian Kinerja Organisasi tersebut di atas.

Gambar 28. E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

The screenshot displays the 'PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023' interface for the 'DIVISI ADMINISTRASI SUMATERA SELATAN'. The table below summarizes the data shown in the interface.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KASCADEING		TARGET				REALISASI			
			KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN	
1.	Tarwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien.	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Sasaran kinerja Pegawai			3.1 Indeks Triwulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.9116	126	Januari: Hasil survey internal bulan Januari sebesar 3.93 Februari: Hasil survey internal bulan Februari sebesar 3.935 Maret: Hasil survey internal bulan Maret sebesar 3.9116	
						TW2	3.1	Indeks	3.9164	123	April: Hasil survey internal bulan April sebesar 3.9252 Mei: Hasil survey internal bulan Mei sebesar 3.9452 Juni: Hasil survey internal bulan Juni sebesar 3.8104	
						TW3	3.1	Indeks	3.9252	127	Juli: Hasil survey internal bulan Juli sebesar 3.888 Agustus: Hasil survey internal bulan Agustus sebesar 3.9188 September: Hasil survey internal bulan September sebesar 3.9292	
						TW4	3.1	Indeks	3.9328	127	Oktober: Hasil survey internal bulan Oktober sebesar 3.9344 November: Hasil survey internal bulan November sebesar 3.9318 Desember: Hasil survey internal bulan Desember sebesar 3.9328	

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring

<https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 6 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah melaksanakan target kinerja tersebut dan telah diunggah pada laman <http://kinerja.kemenkumham.go.id> setiap bulannya.

Secara garis besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki 39 target kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Divisi Administrasi : 10 Target Kinerja

- a) Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah;
- b) Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM;
- c) Seluruh revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari Kepala Kantor Wilayah melalui Divisi Administrasi;
- d) Peningkatan jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan memiliki sertifikat;
- e) Inventarisasi kebutuhan revitalisasi gedung dan bangunan di lingkungan Kantor Wilayah;
- f) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di wilayah;
- g) Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
- h) Optimalisasi implementasi *Corporate University* dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang Hukum dan HAM;
- i) Tata kelola digitalisasi kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah;
- j) Monitoring, evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja.

Divisi Keimigrasian : 3 Target Kinerja

- a) Implementasi pengembangan layanan paspor secara kesisteman;
- b) Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan *Final Rejected* di Wilayah Indonesia;
- c) Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya.

Divisi Pemasarakatan : 9 Target Kinerja

- a) Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* penyelenggaraan pemsarakatan di bidang pelayanan tahanan;
- b) Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* penyelenggaraan pemsarakatan di bidang pemenuhan hak tahanan di Lapas dan Rutan;
- c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemsarakatan di bidang pengelolaan basan baran;
- d) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pemsarakatan;

- e) Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan masyarakat melalui pertukaran data SPPT TI;
- f) Piloting penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting;
- g) Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana;
- h) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban;
- i) Pemutakhiran data pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM : 17 Target Kinerja

- a) Peningkatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b) Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum;
- d) Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah;
- e) Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f) Penerapan PMPJ dan pengawasan audit kepatuhan terhadap notaris;
- g) Pembaharuan data notaris & identifikasi status notaris;
- h) Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
- i) Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia;
- j) Mendorong pertumbuhan permohonan merek *One Village One Brand* dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic;
- k) Terlaksananya kegiatan- kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK;
- l) Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku;
- m) Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang;
- n) Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: sertifikasi pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan ruang lingkup Kabupaten/Kota dan tradisional;
- o) Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia;
- p) Mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- q) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.

Selama tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan selalu melakukan pengunggahan data dukung target kinerja sesuai

dengan timeline yang telah ditentukan. Adapun target kinerja tersebut masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh Unit Eselon I.

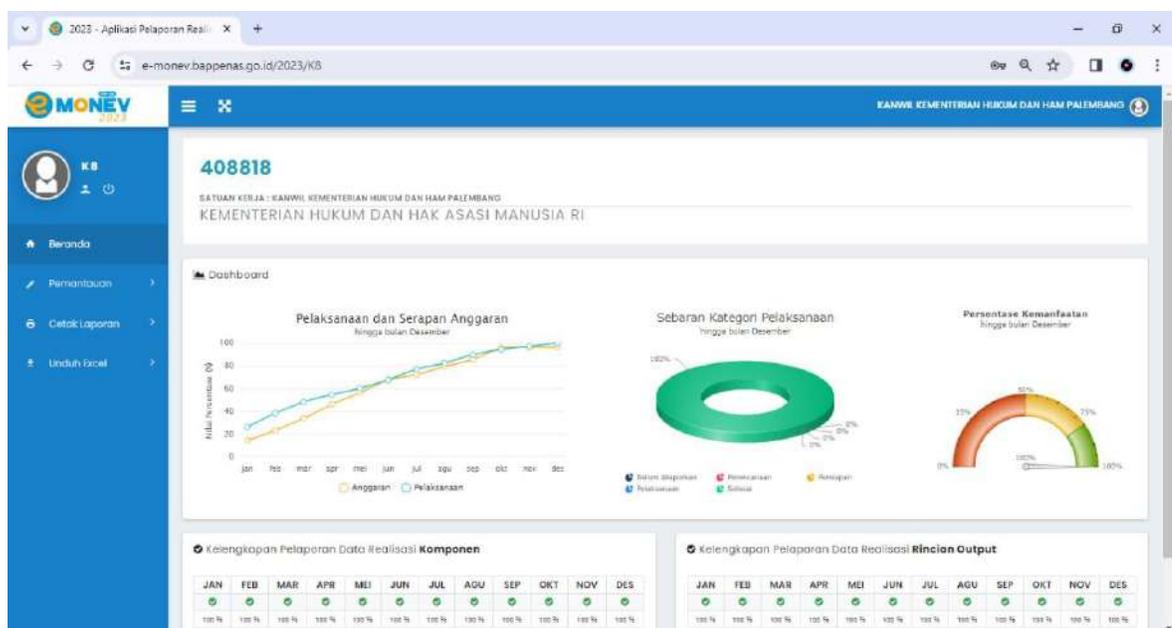
Gambar 29. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

ID	Description	Status	User Comments	Action
T23-B05	Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan.	0	Keterangan User: Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	Upload Data, Belum Verifikasi
T23-B06	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	0	Keterangan User: Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas Rutan	Upload Data, Belum Verifikasi
T23-B07	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan	0		Upload Data, Tulap, Belum Verifikasi

3. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 30. E-Monev Bappenas



4. Kegiatan Prioritas Nasional

- **Prioritas Nasional 4: Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa**
Kementerian Hukum dan HAM turut mewujudkan prioritas nasional 4 melalui data dan informasi Kekayaan Intelektual Komunal yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), Potensi Indikasi Geografis, dan Indikasi Asal.

➤ Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Jumlah Ekspresi Budaya Tradisional ada 36, yaitu:

1. Adat Timbang Kepala Kebo;
2. Ande-Ande
3. Tari Erai-Erai;
4. Tari Siwar;
5. Tari Sambut Muara Enim;
6. Tengkiang;
7. Tari Setabik;
8. Tari Dan Lagu Silampari;
9. Tari Piring Gelas;
10. Tari Putri Behias;
11. Tari Turak;
12. Adat Perkawinan Mabang Handak;
13. Gilas Sangkirai;
14. Incang-Incang Pedamaran;
15. Jejuluk;
16. Midang;
17. Setakatan;
18. Tanidor Pedamaran;
19. Tari Cang-Cang;
20. Tari Penguton;
21. Pendandangan Ranau;
22. Adok;
23. Hiring-Hiring;
24. Kulintang Komerling;
25. Pisaan;
26. Tari Sada Sabia;
27. Tari Putri Bekhusek;
28. Tari Kebagh;
29. Aesan Paksangko;
30. Ngobeng;
31. Rumah Rakit;
32. Tepung Tawar Perdamaian;
33. Tari Lading;

34. Dulmuluk;
35. Surat Ulu; Dan
36. Tembang Batanghari Sembilan.

➤ Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Jumlah pengetahuan tradisional ada 27, yaitu:

1. Sedekah Serabi;
2. Sedekah Rame;
3. Ketu Linggau;
4. Sedekah Ramo;
5. Bekasam Ogan Ilir;
6. Gebeng Khas Ogan Ilir;
7. Pindang Meranjat;
8. Pindang Pegagan;
9. Biduk Kajang;
10. Gerabah Khas Kayu Agung;
11. Gulo Puan;
12. Kepudang;
13. Kue Cupu;
14. Lelang Lebak Lebung;
15. Tikar Purun Pedamaran;
16. Kain Bidak Komering;
17. Burgo;
18. Kue Lapan Jam;
19. Lak Palembang;
20. Selendang Muzawaroh;
21. Tanjak Palembang;
22. Tempoyak Palembang;
23. Tepung Tawar Perdamaian;
24. Segarurung;
25. Tahok Tutok;
26. Pempek Palembang.

➤ Indikasi Asal

Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Terdapat 1 (satu) indikasi asal, yaitu kue gunjing khas Semende.

- Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung terwujudnya prioritas nasional 7, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya seperti dalam hal pemberian bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi, Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari progress beberapa realisasi capaian kinerja. Bahkan, terdapat beberapa indikator yang telah melebihi target itu sendiri. Adapun rincian capaian masing-masing sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 211. Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja
Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi		
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	125,80%
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan		
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	120,17%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	103,37%
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	173,75%
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	120,06%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	157,34%
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	110,73%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	115,40%
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	112,33%
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	129,72%
Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian		
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	120,83%
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum		
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	-3,62%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	116,00%
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	363,64%
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	100%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	125,00%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	91,30%
Badan Pembinaan Hukum Nasional		

1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	100,00%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	194,17%
Direktorat Jenderal HAM		
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1263,67%
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	300,00%
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM		
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	112,50%

Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022, pada jenis belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja belanja modal mengalami kenaikan sebesar 2,04%.

Di samping itu, capaian kinerja lainnya seperti e-performance, e-monev, dan target kinerja yang telah secara rutin dan tepat waktu diinput serta memperoleh nilai yang baik. Meski demikian, masih diperlukan upaya-upaya khususnya untuk meningkatkan capaian perjanjian kinerja serta capaian kinerja anggaran (SMART dan IKPA) sehingga diperoleh nilai yang maksimal. Untuk itu, diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

B. Saran

- 1) Diperlukan upaya-upaya peningkatan PNPB khususnya dalam bidang Administrasi Hukum Umum melalui sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengenai pelayanan jasa Administrasi Hukum Umum;
- 2) Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah,



Ilham Djaya
NIP 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.668.379.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.668.379.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %

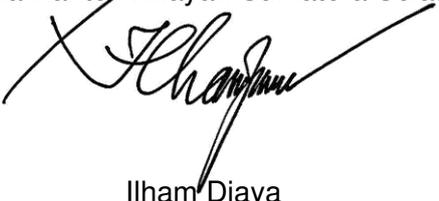
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.527.800.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.527.800.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadian Mużhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

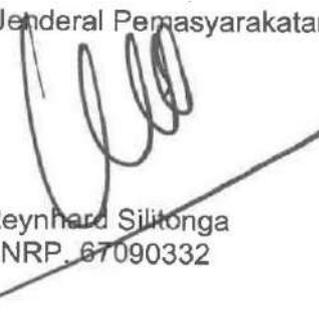
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 161.497.708.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 137.220.095.000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi


Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

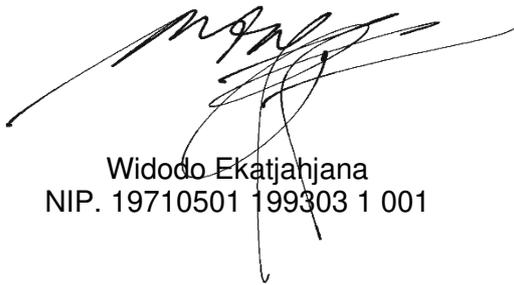
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.134.098.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.134.098.000,-

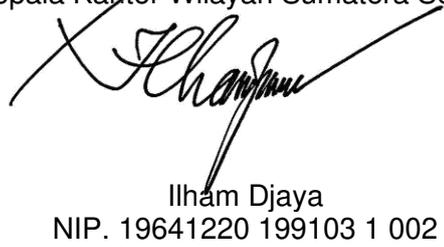
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	33 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.439.387.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.439.387.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Daya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	23 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 355,000,000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 355,000,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya

NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

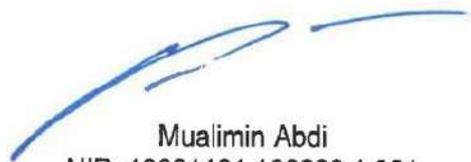
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 216,210,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 216,210,000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

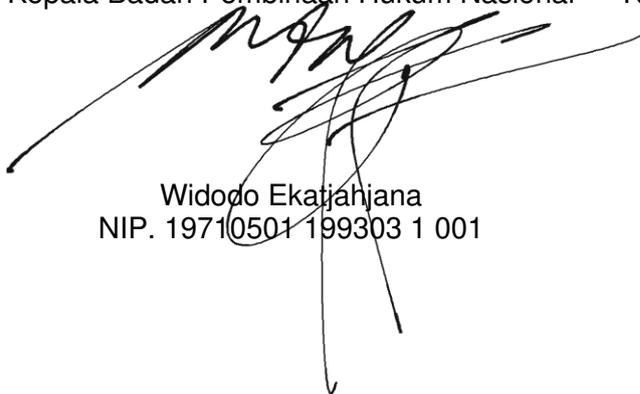
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

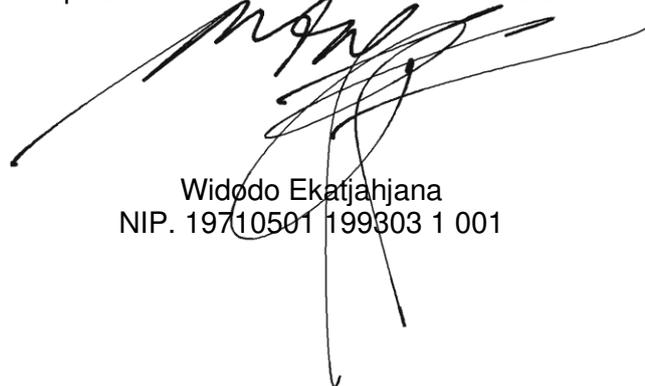
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 135.197.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 135.197.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.506.000.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.506.000.000,-

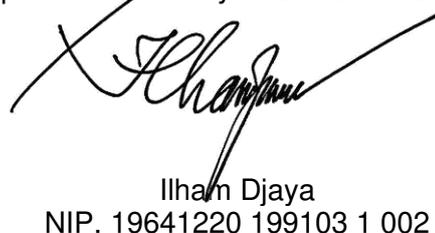
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

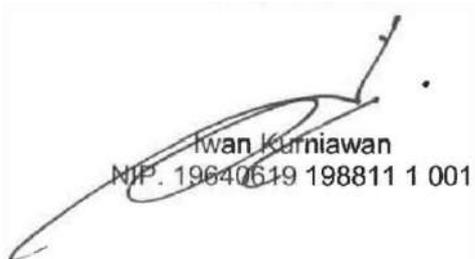
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM


Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

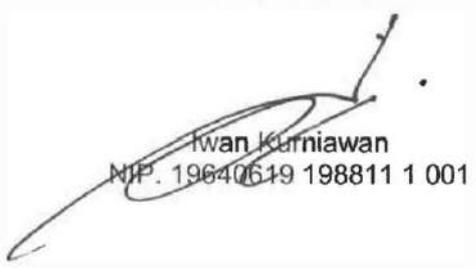
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 214.073.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 214.073.000,-

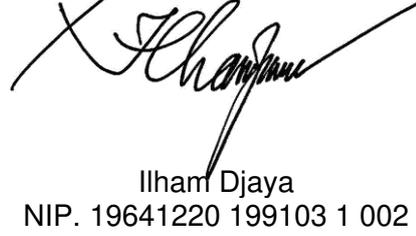
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP. 19641220 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idris
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

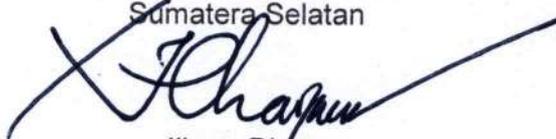
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

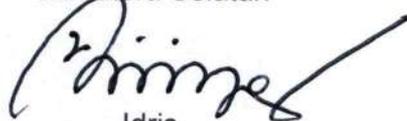
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan


Idris
NIP. 197312101998051001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

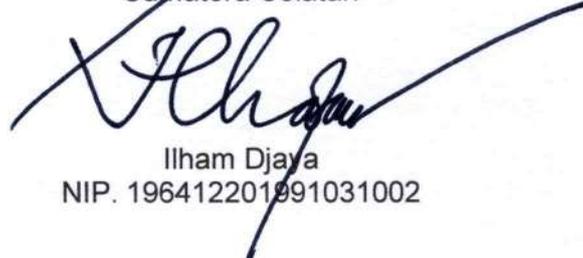
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

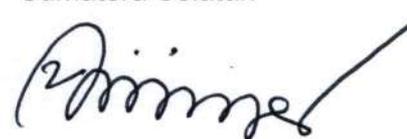
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.668.379.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 19.668.379.000,-

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 Sumatera Selatan


 Ilham Djaya
 NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
 Kepala Divisi Administrasi
 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 Sumatera Selatan


 Idris
 NIP.197312101998051001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idris
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Idris
NIP.197312101998051001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Haryanto
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah

Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Bambang Haryanto
NIP. 196610181992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 806.279.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 806.279.000,-

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah


Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan


Bambang Haryanto
NIP. 196610181992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Haryanto

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 15 Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Bambang Haryanto
NIP.196610181992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdaus
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sumatera Selatan


Herdaus
NIP. 196901111991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.030.473.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.030.473.000,-

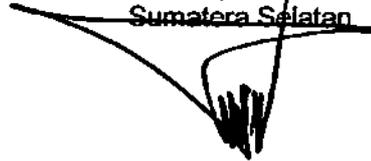
Palembang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sumatera Selatan



Herdaus
NIP. 196901111991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdaus
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 09 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sumatera Selatan

Herdaus
NIP. 196901111991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Parsaoran Simaibang
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ilham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Ilham Djaya
NIP.196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan

Parsaoran Simaibang
NIP. 196306061991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (indeks)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	20 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

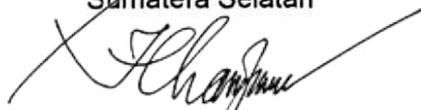
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 5.473.187.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.527.800.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.439.387.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.506.000.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 490.197.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 355.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 135.197.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 216.210.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 216.210.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 214.073.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 214.073.000,-

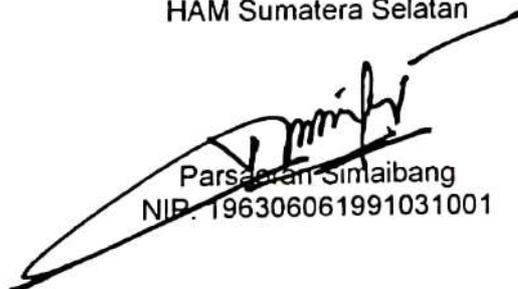
Palembang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan



Ilham Djaya
NIP.196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan



Parsaeran Simaibang
NIP. 196306061991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

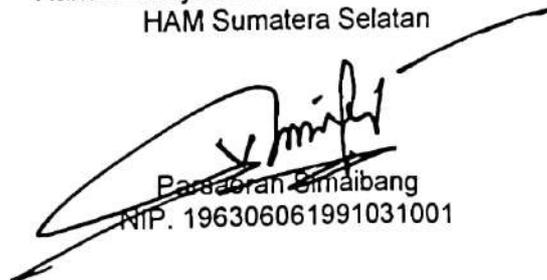
Nama : Parsaoran Simaibang
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 30 Januari 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumatera Selatan


Parsaoran Simaibang
NIP. 196306061991031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Telepon (0711) 355386-358433 Faksimili (0711) 378384
Laman : <http://sumsel.kemenkumham.go.id>

Nomor : W.6-PR.03-0325
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

30 November 2023

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun LKjIP Tahun 2023 satuan kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. LKjIP dibuat berdasarkan **Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023** (bulan Januari s.d akhir Desember 2023).
3. Menyajikan LKjIP dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan yang telah diterima, SK Tim Penyusun LKjIP, dan foto dokumentasi kegiatan.
4. LKjIP Satuan Kerja (UPT) disampaikan kepada Kepala Divisi masing-masing dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui email : ppkanwilsumsel@gmail.com dan Aplikasi SISUMAKER **paling lambat tanggal 31 Desember 2023**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ilham Djaya
NIP 196412201991031002

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

NOTA DINAS
NOMOR W.6-PR.03-0324

Kepada : 1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
3. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Hal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Lampiran : -

Tanggal : 30 November 2023

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyusun LKjIP Tahun 2023 masing-masing Divisi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. LKjIP dibuat berdasarkan **Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023** (bulan Januari s.d akhir Desember 2023);
3. Menyajikan LKjIP dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan yang telah diterima, SK Tim Penyusun LKjIP, dan foto dokumentasi kegiatan;
4. LKjIP masing-masing Divisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui email: ppkanwilsumsel@gmail.com dan Aplikasi SISUMAKER **paling lambat tanggal 2 Januari 2024 pukul 12.00 WIB**;
5. LKjIP seluruh Divisi akan dikompilasi oleh Divisi Administrasi untuk disusun menjadi LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dan di upload melalui aplikasi *e-tarja kemenkumham* pada tanggal 4 Januari 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ilham Djaya
NIP 196412201991031002

Tembusan:

1. Para Pejabat Administrator Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Para Pejabat Pengawas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
3. Para Operator Penyusun LKjIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN NOMOR:
W.6-0038.PR.03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA
SELATAN TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban tercapainya tata kelolaan pemerintah yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN.

KESATU....

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menghimpun data Laporan Kinerja dari masing-masing Divisi;
 2. Melakukan koordinasi dengan masing-masing Divisi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
 4. Menyampaikan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
- KETIGA : Biaya yang timbul berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Februari 2023
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ilham Djaya
NIP 196412201991031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
Nomor : W.6-0038.PR.03 Tahun 2023
Tanggal : 2 Februari 2023

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Pengarah : 1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
4. Kepala Divisi Keimigrasian
- Ketua : Kepala Bagian Program dan Humas
Sekretaris : Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
Anggota : 1. Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
2. Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
3. Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
4. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
5. Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
7. Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
8. Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
9. Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
10. Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian
11. Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
12. Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
13. Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
14. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
16. Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM
17. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
18. Ameylia Kurnyanti
19. Willi Anugrah
20. Arif Budi Santoso
21. A. Jefriansyah Corrie
22. Jam'an
23. Purna Yudha Rujito
24. Eduar Agustian
25. Yuliana
26. Beta Mentari
27. Lydia Sari
28. Al-Firdaus Abu Kamal
29. Joni Ihsan
30. Muhammad Anis Kurniawan
31. Effriansyah
32. Ashari Hidayat



Kepala Kantor Wilayah,



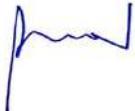
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ilham Djaya

NIP 196412201991031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	22 Maret 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  Indro Purwoko, S.H., M.H. NIP 19620202 198502 1 001
NAMA SOP :	PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
----------------------	--------------------------------

<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
--	---

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
---------------------	-----------------------------------

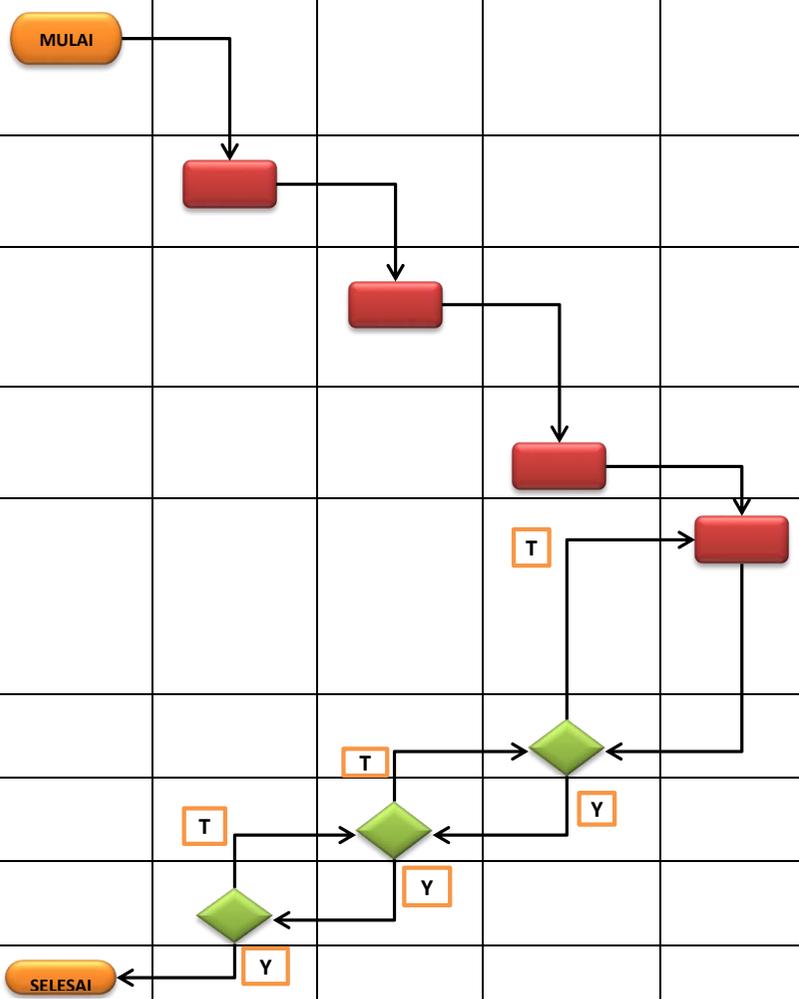
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penomoran Surat2. SOP Pengiriman Surat3. SOP Permintaan Data Kinerja4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Disposisi4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
---	---

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
---------------------	-------------------------------------

Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali
--	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah memerintahkan Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun konsep laporan kinerja Kantor Wilayah	MULAI					instruksi	15 menit	disposisi	
2	Memberikan disposisi kepada Kabag Program dan Humas untuk menyiapkan konsep laporan kinerja Kantor Wilayah						instruksi	15 menit	disposisi	
3	Memberikan disposisi kepada Kasubbag Program dan Pelaporan untuk memfasilitasi pengumpulan data dan menyiapkan konsep laporan kinerja Kantor Wilayah						instruksi	15 menit	disposisi	
4	Memberikan arahan kepada JFU/JFT untuk menghimpun data kinerja dan membuat konsep laporan kinerja						instruksi	30 menit	disposisi	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari setiap divisi, kemudian memverifikasi, mengolah, dan membuat draf laporan kinerja Kantor Wilayah dan menyerahkannya kepada Kasubbag						instruksi	5 hari	draf laporan kinerja	
6	Mengoreksi draf laporan kinerja dan menyerahkannya kepada Kabag Program dan Humas						instruksi	3 hari	draf laporan kinerja	
7	Mengoreksi draf laporan kinerja dan mengirimkannya kepada Kadivmin						draf laporan kinerja	1 hari	draf laporan kinerja	
8	Mengoreksi draf laporan kinerja dan mengirimkannya kepada Kakanwil						draf laporan kinerja	2 hari	draf laporan kinerja	
9	Menyetujui dan menandatangani laporan kinerja	SELESAI					draf laporan kinerja	3 hari	Laporan kinerja	





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	22 Maret 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  Dirancang untuk bersama kita HARUN SULIANTO 19650408 198703 1 002
NAMA SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permintaan Data LKIP2. SOP Permintaan Data Laporan Target Kinerja3. SOP Penyusunan Laporan Target Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Disposisi4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

No	Kegiatan	PELAKSANA					Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	Pelaksana				
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	MULAI					Surat Sekretaris Jenderal	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Bagian PPL untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	
3	Memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	
4	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	30 menit	Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Humas dan Laporan	
5	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	1 Minggu	Konsep Laporan	Konsep Laporan dilengkapi dengan Nota dinas berjenjang dan surat pengantar laporan
6	Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas						Konsep Laporan	30 menit	Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Humas dan Laporan	
7	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi Administrasi						Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	
8	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI					Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	30 menit	LAKIP yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat